



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, telah ditetapkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Klasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 199);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
7. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
8. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip.
- b. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka pengendalian, penataan dan penemuan kembali, serta penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah
- c. mewujudkan tertib Arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi :
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.

Pasal 4

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 68 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 69) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Maret 2023



BUPATI WONOGIRI, 

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,




HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 9



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 4-5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321002, Faks (0273) 322318

Email : setda@wonogirikab.go.id, Website : www.wonogirikab.go.id

Wonogiri 30 Januari 2023



Nomor : 180.18/695
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Fasilitasi 1 (satu) Rancangan
Perbup Kabupaten Wonogiri

Yth. Kepada :
Gubernur Jawa Tengah
c.q. Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Jawa Tengah
di-
SEMARANG

Dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 maka bersama ini kami sampaikan 1 (satu) Raperbup Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya kami mohonkan fasilitasi lebih lanjut terhadap 1 (satu) Raperbup dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI WONOGIRI
SEKRETARIS DAERAH, 

Drs. HARYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640515 198503 1010

Tembusan :

- BUPATI WONOGIRI (Sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 4-5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321002, Faks (0273) 322318

Email : setda@wonogirikab.go.id, Website : www.wonogirikab.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri
Lewat : Asisten Pemerintahan & Kesra Sekda Kab. Wonogiri
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Wonogiri
Tembusan : Bupati Wonogiri (Sebagai laporan)
Tanggal : 26 Januari 2023
Nomor : 180.18 / 022
Perihal : Mohon Asman

Dengan hormat bersama ini terlampir kami haturkan konsep naskah dinas untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah perihal Fasilitasi 1 (satu) Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila tidak ada kebijaksanaan lebih lanjut, kami mohon Bapak berkenan asman.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Frc. MEI DWI KUSWIANTI, SH, M. Hum
Pembina Tk I

NIP. 19740519 199303 2 007

MATRIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

NO	PASAL	RUJUKAN	KETERANGAN
	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:</p> <p>a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip.</p> <p>b. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka pengendalian, penataan dan penemuan kembali, serta penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>c. mewujudkan tertib Arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 2</p>	
	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi :</p> <p>a. fungsi fasilitatif</p> <p>b. fungsi substantif</p> <p>(3) Fungsi fasilitatif sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>(4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.</p> <p>(5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.</p> <p>(6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 3</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Pasal 3</p>	
--	---	--



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS KEARSIPAN

Jalan Yudistiro XIV Nomor 7 Wonogiri 57612

Telepon (0273) 321303, 321643

Website : www.dinaskearsipan.wonogirikab.go.id Email: dinaskearsipan@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENGELOLAAN KEARSIPAN
KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS KEARSIPAN
KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang sesuai dengan norma, standar prosedur kaidah penyelenggaraan kearsipan, maka perlu menyusun pedoman Pengelolaan kearsipan ;
 - b. bahwa agar penyusunan pedoman kearsipan tersebut huruf a dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Wonogiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

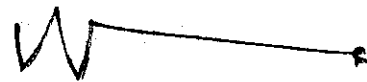
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 199);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Wonogiri tersebut Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. merencanakan penyusunan Pedoman Kearsipan ;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Pedoman Kearsipan dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi terkait;
 3. melakukan pendokumentasian kegiatan penyusunan pedoman;
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal, **2 Januari 2023**

KEPALA DINAS KEARSIPAN
KABUPATEN WONOGIRI,



SRI WAHYU WIDAYATTO

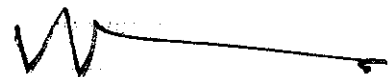
LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : **04** TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENGELOLAAN
KEARSIPAN KABUPATEN WONOGIRI

TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGELOLAAN KEARSIPAN
KABUPATEN WONOGIRI

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri	Ketua
2.	Kepala Bidang Kearsipan Kabupaten Wonogiri	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri	Anggota
4.	Perancang Peraturan Perundang Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri	Anggota
5.	Arsiparis Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri	Anggota

KEPALA DINAS KEARSIPAN
KABUPATEN WONOGIRI,



SRI WAHYU WIDAYATTO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

000		UMUM
000	.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
000	.2	PERLENGKAPAN
000	.3	PENGADAAN
000	.4	PERPUSTAKAAN
000	.5	KEARSIPAN
000	.6	PERSANDIAN
000	.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
000	.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
000	.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
100		PEMERINTAHAN
100	.1	OTONOMI DAERAH
100	.2	PEMERINTAH DAERAH
100	.3	HUKUM
200		POLITIK
200	.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
200	.2	PEMILU
300		KEAMANAN DAN KETERTIBAN
300	.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
300	.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
400		KESEJAHTERAAN RAKYAT
400	.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
400	.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
400	.3	PENDIDIKAN
400	.4	KEOLAHRAGAAN
400	.5	KEPEMUDAAN
400	.6	KEBUDAYAAN
400	.7	KESEHATAN
400	.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN
400	.9	SOSIAL
400	.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
400	.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
400	.12	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
400	.13	KELUARGA BERENCANA
400	.14	HUBUNGAN MASYARAKAT
500		PEREKONOMIAN
500	.1	KETAHANAN PANGAN
500	.2	PERDAGANGAN
500	.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
500	.4	KEHUTANAN
500	.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN

500	.6		PERTANIAN
500	.7		PETERNAKAN
500	.8		PERKEBUNAN
500	.9		PERINDUSTRIAN
500	.10		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
500	.11		PERHUBUNGAN
500	.12		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
500	.13		PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
500	.14		STATISTIK
500	.15		KETENAGAKERJAAN
500	.16		PENANAMAN MODAL
500	.17		PERTANAHAN
500	.18		TRANSMIGRASI
600			PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
600	.1		PEKERJAAN UMUM
600	.2		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
600	.3		TATA RUANG (TATA KOTA)
600	.4		LINGKUNGAN HIDUP
700			PENGAWASAN
700	.1		PENGAWASAN INTERNAL
800			KEPEGAWAIAN
800	.1		SUMBER DAYA MANUSIA
800	.1	.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai
800	.1	.3	Mutasi Pegawai
800	.1	.4	Pengembangan Karir
800	.1	.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara
800	.1	.11	Administrasi Pegawai
800	.1	.12	Kesejahteraan Pegawai
800	.2		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
900			KEUANGAN
900	.1		KEUANGAN DAERAH
900	.1	.1	RAPBD dan APBD-P
900	.1	.2	Penyusunan Anggaran
900	.1	.3	Pelaksanaan Anggaran
900	.1	.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900	.1	.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900	.1	.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
900	.1	.12	Anggaran Daerah
900	.1	.13	Pendapatan dan Investasi Daerah
900	.1	.15	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
000				UMUM
000	.1			KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
000	.1	.1		Telekomunikasi
000	.1	.2		Perjalanan Dinas Dalam Negeri
000	.1	.2	.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000	.1	.2	.2	Perjalanan Dinas Anggota DPRD
000	.1	.2	.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000	.1	.3		Perjalanan Dinas Luar Negeri
000	.1	.3	.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000	.1	.3	.2	Perjalanan Dinas Anggota DPRD
000	.1	.3	.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000	.1	.4		Penggunaan Fasilitas Kantor Antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, wisma Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya
000	.1	.5		Rapat Pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
000	.1	.6		Penyediaan Konsumsi
000	.1	.7		Pengurusan kendaraan dinas
000	.1	.7	.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
000	.1	.7	.2	Pemeliharaan dan perbaikan
000	.1	.7	.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
000	.1	.8		Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
000	.1	.8	.1	Pertamanan/ Landscape
000	.1	.8	.2	Penghijauan
000	.1	.8	.3	Perbaikan Gedung
000	.1	.8	.4	Perbaikan Peralatan Kantor
000	.1	.8	.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
000	.1	.8	.6	Kebersihan Gedung dan Taman
000	.1	.9		Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon, dan komputer
000	.1	.9	.1	Perbaikan/pemeliharaan
000	.1	.9	.2	Pemasangan
000	.1	.10		Ketertiban dan keamanan
000	.1	.10	.1	Pengamanan, penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas
000	.1	.10	.2	Laporan Ketertiban dan keamanan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
000	.1	.11		Administrasi pengelolaan parkir
000	.1	.12		Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan dan pegawai lainnya
000	.2			PERLENGKAPAN
000	.2	.1		Inventarisasi dan Penyimpanan
000	.2	.1	.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
000	.2	.1	.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
000	.2	.2		Pemeliharaan peralatan kantor
000	.2	.2	.1	Data hasil pemeliharaan kantor
000	.2	.2	.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
000	.2	.3		Distribusi
000	.2	.3	.1	Barang habis pakai
000	.2	.3	.2	Barang milik daerah
000	.2	.4		Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara, Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuska, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya lelang penghapusan
000	.2	.5		Pengelolaan Database Barang Milik Daerah
000	.3			PENGADAAN
000	.3	.1		Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
000	.3	.2		Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
000	.3	.3		Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
000	.3	.4		Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
000	.3	.5		Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa
000	.3	.6		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
000	.4			PERPUSTAKAAN
000	.4	.1		Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000	.4	.2		Deposit Bahan Pustaka
000	.4	.2	.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
000	.4	.2	.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
000	.4	.2	.3	Terbitan Internasional dan Regional
000	.4	.2	.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan
000	.4	.2	.5	Bibliografi dan Katalog
000	.4	.3		Koleksi Pustaka
000	.4	.3	.1	Pembelian
000	.4	.3	.2	Hibah
000	.4	.3	.3	Hadiah
000	.4	.3	.4	Tukar menukar
000	.4	.3	.5	Implementasi Undang-Undang KCKR
000	.4	.3	.6	Terbitan Internal
000	.4	.3	.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus
000	.4	.3	.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
000	.4	.4		Pengolahan Bahan Pustaka
000	.4	.5		Pangkalan Data Katalog Koleksi
000	.4	.6		Layanan Perpustakaan
000	.4	.6	.1	Keanggotaan
000	.4	.6	.2	Peminjaman
000	.4	.6	.3	Pengembangan gemar baca
000	.4	.7		Kerjasama Perpustakaan
000	.4	.7	.1	MoU
000	.4	.7	.2	Perjanjian kerjasama
000	.4	.7	.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
000	.4	.8		Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
000	.4	.8	.1	Pengembangan situs web
000	.4	.8	.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
000	.4	.8	.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan
000	.4	.8	.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital
000	.4	.9		Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
000	.4	.10		Konsersi
000	.4	.10	.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
000	.4	.10	.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
000	.4	.10	.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
000	.4	.11		Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
000	.4	.12		Transformasi Digital
000	.4	.13		Kurasi Digital
000	.4	.14		Pengembangan Perpustakaan
000	.4	.14	.1	Perpustakaan Umum
000	.4	.14	.2	Perpustakaan Khusus
000	.4	.14	.3	Perpustakaan Sekolah
000	.4	.14	.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi
000	.5			KEARSIPAN
000	.5	.1		Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000	.5	.2		Pembinaan Kearsipan
000	.5	.2	.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
000	.5	.2	.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
000	.5	.2	.3	Penilaian Arsiparis
000	.5	.2	.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
000	.5	.2	.5	Data Base Arsiparis
000	.5	.2	.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
000	.5	.2	.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
000	.5	.2	.8	Data Base Bimbingan, Konsultasi dan Supervisi
000	.5	.2	.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
000	.5	.2	.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
000	.5	.2	.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
000	.5	.3		Pengelolaan Arsip Dinamis
000	.5	.3	.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
000	.5	.3	.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
000	.5	.3	.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
000	.5	.3	.4	Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)
000	.5	.3	.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli. pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)
000	.5	.4		Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)
000	.5	.5		Pengelolaan Arsip Terjaga antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga
000	.5	.6		Penyusutan Arsip
000	.5	.6	.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang Dipindahkan)
000	.5	.6	.2	Pemusnahan Arsip, antara lain: Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip yang dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip yang dimusnahkan
000	.5	.6	.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, utuh terpercaya dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
000	.5	.7		Alih Media Arsip Antara lain : Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar arsip yang dialihmediakan.
000	.5	.8		Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
000	.5	.8	.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
000	.5	.8	.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
000	.5	.9		Pengelolaan Arsip Statis
000	.5	.9	.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan, Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan.

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
000	.5	.9	.2	Penghargaan dan Imbalan
000	.5	.9	.3	Sejarah Lisan antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkrip)
000	.5	.9	.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
000	.5	.9	.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
000	.5	.9	.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian Hama terpadu, reproduksi (alih media)
000	.5	.9	.7	Preservasi Kuratif
000	.5	.9	.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)
000	.5	.9	.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
000	.5	.10		Jasa Kearsipan (antara lain : konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)
000	.5	.11		Pengelolaan SIKN dan JIKN
000	.5	.12		Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
000	.5	.13		Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
000	.5	.14		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
000	.5	.15		Pengawasan Kearsipan
000	.5	.15	.1	Pengawasan Kearsipan Internal
000	.5	.15	.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
000	.5	.15	.3	Sanksi
000	.5	.16		Pengembangan Kearsipan
000	.5	.15	.1	Sistem Kearsipan
000	.5	.15	.2	Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
000	.6			PERSANDIAN
000	.6	.1		Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000	.6	.2		Pengamanan persandian
000	.6	.2	.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi
000	.6	.2	.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi
000	.6	.2	.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
000	.6	.3		Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
000	.6	.3	.1	Perencanaan Pengkajian
000	.6	.3	.2	Administrasi Pengkajian
000	.6	.3	.3	Pelaksanaan
000	.6	.3	.4	Pelaporan
000	.6	.4		Pembinaan dan Pengendalian Persandian
000	.6	.4	.1	Sumber Daya Manusia (SDM)
000	.6	.4	.2	Jaring Komunikasi
000	.6	.5		Layanan Sertifikasi Elektronik
000	.6	.5	.1	Perencanaan dan Administrasi
000	.6	.5	.2	Pelaksanaan Verifikasi
000	.6	.5	.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
000	.6	.5	.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
000	.6	.5	.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
000	.6	.5	.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
000	.6	.5	.7	Pelaporan
000	.7			PERENCANAAN PEMBANGUNAN
000	.7	.1		Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
000	.7	.1	.1	Musrenbang Provinsi
000	.7	.1	.2	Musrenbang Nasional
000	.7	.1	.3	Musrenbang Kab/Kota
000	.7	.1	.4	Musrenbang Kecamatan
000	.7	.1	.5	Musrenbang Kelurahan
000	.7	.1	.6	Musrenbang Desa
000	.7	.2		Perencanaan Pembangunan Daerah
000	.7	.2	.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
000	.7	.2	.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
000	.7	.2	.3	Rencana Anggaran Daerah
000	.7	.2	.4	Rencana Pembangunan Tahunan
000	.7	.2	.5	Rencana Pembentukan Perangkat Daerah
000	.7	.2	.6	Program kerja tahunan
000	.7	.2	.7	Penetapan / Kontrak Kinerja

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
000	.7	.2	.8	Laporan Berkala
000	.7	.2	.9	Laporan Insidental
000	.7	.2	.10	Evaluasi Program
000	.7	.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
000	.7	.4		Konsultasi Perencanaan Pembangunan
000	.7	.5		Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
000	.7	.6		Aksi Strategis Daerah
000	.7	.6	.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
000	.7	.6	.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
000	.7	.6	.3	Sosisialisasi dengan Perangkat Daerah
000	.7	.6	.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
000	.7	.6	.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
000	.7	.7		Perencanaan Pendanaan Pembangunan
000	.7	.7	.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
000	.7	.7	.2	Pendanaan Daerah
000	.7	.7	.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
000	.7	.7	.4	Surat Berharga Syariah Negara
000	.7	.7	.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
000	.8			ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
000	.8	.1		Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah
000	.8	.1	.1	Pembentukan
000	.8	.1	.2	Pengubahan
000	.8	.1	.3	Pembubaran
000	.8	.2		Uraian Jabatan
000	.8	.2	.1	Analisa Jabatan
000	.8	.2	.2	Analisa Beban Kerja
000	.8	.3		Ketatalaksanaan
000	.8	.3	.1	Proses Bisnis
000	.8	.3	.2	Standar Pelayanan
000	.8	.3	.3	Standar Operasional Prosedur
000	.8	.3	.4	Pelayanan Publik
000	.8	.4		Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
000	.8	.5		Evaluasi Kelembagaan
000	.8	.6		Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
000	.8	.6	.1	Budaya Kerja
000	.8	.6	.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
000	.8	.6	.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
000	.9			PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN
000	.9	.1		Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
000	.9	.2		Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi
000	.9	.3		Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan
000	.9	.4		Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
000	.9	.5		Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000	.9	.6		Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000	.9	.6	.1	Data
000	.9	.6	.2	Statistik
000	.9	.6	.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
000	.9	.7		Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000	.9	.8		Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
000	.9	.9		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
000	.9	.10		Seminar, lokakarya, temukarya, workshop
100				PEMERINTAHAN
100	.1			OTONOMI DAERAH
100	.1	.1		Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
100	.1	.2		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten (Fasilitasi Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
100	.1	.3		Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
100	.1	.4		Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100	.1	.4	.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
100	.1	.4	.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
100	.1	.4	.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
100	.1	.4	.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah - DPRD)
100	.1	.4	.5	Assosiasi Daerah
100	.1	.5		Otonomi khusus dan daerah istimewa
100	.1	.6		Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100	.1	.6	.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100	.1	.6	.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
100	.1	.6	.3	Pengembangan Kapasitas Daerah
100	.1	.7		LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)
100	.1	.8		Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
100	.1	.8	.1	Pembentukan Kecamatan
100	.1	.8	.2	Pemekaran Kecamatan
100	.1	.8	.3	Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
100	.1	.8	.4	Pemindahan Ibu Kota Kecamatan
100	.1	.8	.5	Laporan Kecamatan
100	.1	.9		Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
100	.1	.9	.1	Kepala Desa/Kelurahan
100	.1	.9	.2	Lembaga Musyawarah Desa
100	.1	.9	.3	Perangkat Desa/Kelurahan
100	.1	.9	.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan (APBDes/Kel)
100	.1	.9	.5	Keuangan Desa
100	.1	.9	.6	Kekayaan Desa, antara lain : Bando desa, tanah bengkok, dll
100	.1	.9	.7	Lembaga Tingkat Desa, antara lain : Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama Antar Desa
100	.1	.9	.8	Administrasi Desa/Kelurahan : Momografi, Peta rupa bumi dll
100	.1	.9	.9	Kewilayahan
				Antara lain: Pembentukan Desa/Kelurahan, pemekaran, Perubahan batas wilayah/Perluasan Desa, permasalahan batas Desa/Kelurahan, penghapusan Desa/Kelurahan
100	.1	.9	.10	Pembangunan Desa
100	.1	.9	.11	Perekonomian Desa: Produksi Desa, Koperasi Desa
100	.1	.9	.12	Prasarana Desa
100	.1	.9	.13	Pengembangan Desa
100	.1	.9	.14	Koordinasi : Sektor khusus, Rapat Koordinasi, Kerjasama
100	.1	.9	.15	RT-RW/RK

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
100	.2			PEMERINTAHAN UMUM
100	.2	.1		Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
100	.2	.2		Dekonsentrasi dan Kerjasama
100	.2	.2	.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
100	.2	.2	.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Bupati sebagai Wakil Pemerintah
100	.2	.2	.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
100	.2	.2	.4	Fasilitasi Kecamatan
100	.2	.2	.5	Fasilitasi Pelayanan Umum
100	.2	.3		Wilayah Administrasi dan Perbatasan
100	.2	.3	.1	Toponimi dan Data Wilayah
100	.2	.3	.3	Batas Antar Daerah Wilayah
100	.2	.3	.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
100	.2	.3	.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
100	.3			HUKUM
100	.3	.1		Program Legislasi
100	.3	.1	.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
100	.3	.1	.2	Program Legislasi
100	.3	.2		Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Daerah termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan
100	.3	.3		Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
100	.3	.3	.1	Keputusan / Ketetapan Gubernur
100	.3	.3	.2	Keputusan / Ketetapan Bupati
100	.3	.3	.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
100	.3	.3	.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
100	.3	.4		Instruksi / Surat Edaran
100	.3	.4	.1	Instruksi / Surat Edaran Provinsi
100	.3	.4	.2	Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
100	.3	.4	.4	Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
100	.3	.5		Surat Perintah
100	.3	.5	.1	Surat Perintah Gubernur
100	.3	.5	.2	Surat Perintah Bupati
100	.3	.5	.3	Surat Perintah Walikota
100	.3	.5	.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
100	.3	.6		Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk/Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
100	.3	.7		Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MoU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama
100	.3	.7	.1	Dalam Negeri
100	.3	.7	.2	Luar Negeri
100	.3	.8		Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)
100	.3	.9		Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
100	.3	.10		Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian/bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
100	.3	.11		Kasus/ Sengketa Hukum
100	.3	.11	.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
100	.3	.11	.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
100	.3	.11	.3	Tata Usaha Negara
100	.3	.11	.4	Perburuhan
100	.3	.11	.5	Arbitrase
100	.3	.11	.6	Sengketa Adat
100	.3	.12		Perijinan
100	.3	.13		Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
100	.3	.13	.1	Hak Cipta
100	.3	.13	.2	Hak Paten
100	.3	.13	.3	Hak Desain Industri
100	.3	.13	.4	Hak Rahasia Dagang
100	.3	.13	.5	Hak Merk
100	.3	.14		Permohonan HAKI yang ditolak

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
200				POLITIK
200	.1			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
200	.1	.1		Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
200	.1	.2		Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
200	.1	.2	.1	Ketahanan Ideologi Negara
200	.1	.2	.2	Wawasan Kebangsaan
200	.1	.2	.3	Bela Negara
200	.1	.2	.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
200	.1	.2	.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
200	.1	.3		Kewaspadaan Nasional
200	.1	.3	.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
200	.1	.3	.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
200	.1	.3	.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
200	.1	.3	.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
200	.1	.4		Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
200	.1	.4	.1	Ketahanan Seni
200	.1	.4	.2	Ketahanan Budaya
200	.1	.4	.3	Agama dan Kepercayaan
200	.1	.4	.4	Organisasi Kemasyarakatan
200	.1	.4	.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
200	.1	.4	.6	Fasilitasi
200	.1	.4	.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
200	.1	.4	.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
200	.1	.4	.9	Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi
200	.1	.4	.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
200	.1	.4	.11	Fasilitasi Ormas
200	.1	.5		Politik Dalam Negeri
200	.1	.5	.1	Implementasi Kebijakan Politik
200	.1	.5	.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
200	.1	.5	.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
200	.1	.5	.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik yang memperoleh kursi
200	.1	.5	.5	Partai Politik yang tidak memperoleh kursi
200	.1	.5	.6	Pemerintah Daerah
200	.1	.5	.7	Database Parpol
200	.1	.5	.8	Pendidikan Budaya Politik
200	.1	.5	.9	Pemilihan Umum
200	.1	.6		Ketahanan Ekonomi
200	.1	.6	.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
200	.1	.6	.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
200	.1	.6	.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
200	.1	.6	.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
200	.2			PEMILU
200	.2	.1		Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh pemerintah Daerah
200	.2	.2		Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
200	.2	.2	.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
200	.2	.2	.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
200	.2	.2	.3	Daftar Pemilih Tambahan
200	.2	.2	.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
200	.2	.2	.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
200	.2	.3		Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
200	.2	.3	.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
200	.2	.3	.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
200	.2	.3	.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
200	.2	.3	.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual
200	.2	.4		Penetapan Peserta Pemilu
200	.2	.4	.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
200	.2	.4	.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
200	.2	.4	.5	Peta Daerah Pemilihan
200	.2	.5		Pencalonan Pemilu
200	.2	.5	.1	Petunjuk teknis pencalonan
200	.2	.5	.2	Surat pencalonan pendaftaran
200	.2	.5	.3	Daftar bakal calon
200	.2	.5	.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
200	.2	.5	.5	Dokumen verifikasi administrasi
200	.2	.5	.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200	.2	.6		Kampanye Pemilu
200	.2	.6	.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
200	.2	.6	.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
200	.2	.6	.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
200	.2	.7		Dana Kampanye
200	.2	.7	.1	Pedoman audit dana kampanye
200	.2	.7	.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
200	.2	.7	.3	Laporan hasil audit dana kampanye
200	.2	.8		Pemungutan dan Penghitungan Suara
200	.2	.8	.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
200	.2	.8	.2	Master surat suara
200	.2	.8	.3	Surat suara yang terpakai
200	.2	.8	.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
200	.2	.8	.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
200	.2	.9		Penetapan Hasil Pemilu
200	.2	.10		Perselisihan Hasil Pemilu
200	.2	.10	.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
200	.2	.10	.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
200	.2	.10	.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
200	.2	.11		Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu
300				KEAMANAN DAN KETERTIBAN
300	.1			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
300	.1	.1		Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan pada Pemerintah Daerah
300	.1	.2		Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
300	.1	.2	.1	Tata Operasional Polisi Pamong Praja
300	.1	.2	.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
300	.1	.3		Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
300	.1	.4		Perlindungan Masyarakat
300	.1	.5		Penyidik Pegawai Negeri Sipil
300	.1	.6		Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia
300	.2			PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN
300	.2	.1		Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
300	.2	.2		Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
300	.2	.2	.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
300	.2	.2	.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
300	.2	.2	.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
300	.2	.2	.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
300	.2	.2	.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, siaga dan latihan, tempat latihan
300	.2	.2	.6	Registrasi BEACON
300	.2	.3		Pencegahan dan Kesiapsiagaan
300	.2	.4		Potensi Pencarian dan Pertolongan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
300	.2	.5		Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan
300	.2	.5	.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan
300	.2	.5	.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
300	.2	.5	.3	Pemasarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300	.2	.5	.4	Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
300	.2	.5	.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300	.2	.6		Operasi Pencarian dan Pertolongan
300	.2	.7		Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
300	.2	.8		Operasi Komunikasi
300	.2	.8	.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
300	.2	.8	.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
300	.2	.8	.3	Registrasi BEACON
300	.2	.9		Inventarisasi dan Pemeliharaan
300	.2	.10		Pengembangan Sistem Informasi
300	.2	.11		Penyajian dan Layanan Informasi
300	.2	.12		Pelaporan dan Evaluasi
300	.2	.12	.1	Laporan Harian
300	.2	.12	.2	Laporan Bulanan
300	.2	.12	.3	Laporoan Tahunan
300	.2	.12	.4	Evaluasi
400				KESEJAHTERAAN RAKYAT
400	.1			PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
400	.1	.1		Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400	.1	.2		Pembangunan Sumber Daya
400	.1	.2	.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
400	.1	.2	.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
400	.1	.2	.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
400	.1	.2	.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
400	.1	.2	.5	Fasilitasi Teknologi dan Inovasi
400	.1	.2	.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
400	.1	.2	.7	Pemantauan dan evaluasi
400	.1	.3		Peningkatan Infrastruktur
400	.1	.3	.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infastruktur
400	.1	.3	.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infastruktur

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.1	.3	.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infastruktur
400	.1	.3	.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infastruktur
400	.1	.3	.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infastruktur
400	.1	.3	.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infastruktur
400	.1	.3	.7	Pemantauan dan evaluasi
400	.1	.4		Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
400	.1	.4	.1	Fasilitasi Investasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
400	.1	.4	.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
400	.1	.4	.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
400	.1	.4	.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
400	.1	.4	.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
400	.1	.4	.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
400	.1	.4	.7	Pemantauan dan evaluasi
400	.1	.4	.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
400	.1	.4	.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
400	.1	.4	.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
400	.1	.4	.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
400	.1	.4	.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
400	.1	.4	.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
400	.1	.4	.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
400	.1	.5		Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
400	.1	.5	.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
400	.1	.5	.2	Penguatan organisasi masyarakat
400	.1	.5	.3	Pemberdayaan masyarakat
400	.1	.5	.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
400	.1	.5	.5	Ketenagakerjaan
400	.1	.5	.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
400	.1	.5	.7	Pemantauan dan evaluasi
400	.1	.6		Pengembangan Daerah Khusus
400	.1	.6	.1	Fasilitasi pengembangan Daerah Perbatasan
400	.1	.6	.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
400	.1	.6	.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
400	.1	.6	.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
400	.1	.6	.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
400	.1	.6	.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
400	.1	.6	.7	Pemantauan dan evaluasi

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.2			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
400	.2	.1		Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400	.2	.2		Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
400	.2	.2	.1	Data gender
400	.2	.2	.2	Advokasi dan fasilitasi
400	.2	.3		Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja Korban Perdagangan)
400	.2	.3	.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
400	.2	.3	.2	Data perlindungan perempuan
400	.2	.3	.3	Advokasi dan fasilitasi
400	.2	.3	.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
400	.2	.3	.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
400	.2	.3	.6	Analisis dan penyajian informasi gender
400	.2	.3	.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
400	.2	.4		Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
400	.2	.4	.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
400	.2	.4	.2	Data perlindungan anak
400	.2	.4	.3	Advokasi dan fasilitasi
400	.2	.4	.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
400	.2	.4	.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
400	.2	.5		Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
400	.2	.5	.1	Pemenuhan Hak Anak
400	.2	.5	.2	Data Klaster Hak Anak
400	.2	.5	.3	Data tumbuh kembang anak
400	.2	.5	.4	Advokasi dan fasilitasi
400	.2	.5	.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
400	.2	.5	.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
400	.2	.6		Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
400	.2	.7		Penghargaan Kabupaten Layak Anak
400	.2	.8		Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.3			PENDIDIKAN
400	.3	.1		Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400	.3	.2		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
400	.3	.2	.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
400	.3	.2	.2	Pelatihan Sosial
400	.3	.2	.3	Peringatan Hari anak
400	.3	.2	.4	Block Grant
400	.3	.3		Pendidikan Masyarakat
400	.3	.3	.1	Penyelenggaraan Program
400	.3	.3	.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
400	.3	.3	.3	Pembinaan Program
400	.3	.3	.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
400	.3	.3	.5	Pameran
400	.3	.3	.6	Rakor
400	.3	.3	.7	Sosialisasi
400	.3	.3	.8	Sertifikasi dan Akreditasi
400	.3	.4		Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400	.3	.5		Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
400	.3	.5	.1	Kurikulum, bahan ajar
400	.3	.5	.2	Block Grant
400	.3	.5	.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
400	.3	.5	.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
400	.3	.5	.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
400	.3	.5	.6	Bantuan Siswa Miskin
400	.3	.6		Pendidikan khusus/Layanan Khusus
400	.3	.6	.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
400	.3	.6	.2	Block Grant
400	.3	.6	.3	Lomba, festival
400	.3	.6	.4	Sosialisasi, bimtek
400	.3	.6	.5	Pendataan
400	.3	.6	.6	Kelembagaan
400	.3	.7		Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400	.3	.7	.1	Pendataan dan Pemetaan
400	.3	.7	.2	Uji Kompetensi Guru
400	.3	.7	.3	Sertifikasi Guru
400	.3	.7	.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
400	.3	.7	.5	Peningkatan kesejahteraan guru
400	.3	.7	.6	Sosialisasi, bimtek
400	.3	.7	.7	Block Grant
400	.3	.8		Sekolah Menengah Atas

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.3	.9		Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
400	.3	.9	.1	Bahan ajar
400	.3	.9	.2	Petunjuk Teknis
400	.3	.9	.3	Block grant
400	.3	.9	.4	Sosialisasi, bimtek
400	.3	.9	.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
400	.3	.9	.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
400	.3	.9	.7	Alat bantu pembelajaran
400	.3	.9	.8	Pendataan
400	.3	.9	.9	Kelembagaan (UKS, Pendidikan jasmani adaptif, dan Pendidikan Inklusi)
400	.3	.10		Pendidik dan Tenaga Pendidik
400	.3	.10	.1	Pendataan dan Pemetaan
400	.3	.10	.2	Uji Kompetensi Guru
400	.3	.10	.3	Sertifikasi Guru
400	.3	.10	.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
400	.3	.10	.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
400	.3	.10	.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
400	.3	.10	.7	Block grant
400	.3	.10	.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
400	.3	.11		Penilaian Pendidikan
400	.3	.11	.1	Penilaian Akademik
400	.3	.11	.2	Penilaian Non Akademik
400	.3	.11	.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400	.3	.12		Data dan Statistik Pendidikan
400	.3	.12	.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
400	.3	.12	.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
400	.3	.13		Prasarana dan Sarana Pendidikan
400	.3	.13	.1	Prasarana Pendidikan
400	.3	.13	.2	Sarana Pendidikan
400	.3	.13	.3	Monitoring dan Evaluasi
400	.4			KEOLAHRAGAAN
400	.4	.1		Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400	.4	.2		Pengelolaan Olahraga Pendidikan
400	.4	.2	.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
400	.4	.2	.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
400	.4	.2	.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
400	.4	.3		Pengelolaan Olahraga Rekreasi
400	.4	.3	.1	Olahraga Massal

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.4	.3	.2	Olahraga Tradisional
400	.4	.3	.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata
400	.4	.4		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
400	.4	.4	.1	Olahraga Pendidikan
400	.4	.4	.2	Olahraga Rekreasi
400	.4	.4	.3	Olahraga Prestasi
400	.4	.4	.4	Sekolah Khusus Olahraga
400	.4	.5		Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
400	.4	.5	.1	Olahraga Tradisional
400	.4	.5	.2	Layanan Khusus
400	.4	.6		Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
400	.4	.6	.1	Kemitraan Keolahragaan
400	.4	.6	.2	Penghargaan Olahraga
400	.4	.7		Pembibitan dan IPTEK Olahraga
400	.4	.7	.1	Pembibitan Olahraga
400	.4	.7	.2	Kompetisi
400	.4	.7	.3	IPTEK Olahraga
400	.4	.8		Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
400	.4	.8	.1	Tenaga Keolahragaan
400	.4	.8	.2	Organisasi Keolahragaan
400	.4	.9		Industri dan Promosi Olahraga
400	.4	.9	.1	Industri Olahraga
400	.4	.9	.2	Promosi Olahraga
400	.4	.10		Olahraga Prestasi
400	.4	.10	.1	Daerah
400	.4	.10	.2	Nasional
400	.4	.10	.3	Internasional
400	.4	.11		Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
400	.4	.11	.1	Standardisasi Keolahragaan
400	.4	.11	.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
400	.4	.11	.3	Infrastruktur Olahraga
400	.5			KEPEMUDAAN
400	.5	.1		Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400	.5	.2		Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
400	.5	.2	.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
400	.5	.2	.2	Pengkajian (Rekomendasi melalui forum Kepemudaan)
400	.5	.2	.3	Pengembangan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.5	.3		Peningkatan Wawasan Pemuda
400	.5	.3	.1	Wawasan Kebangsaan
400	.5	.3	.2	Wawasan Lingkungan
400	.5	.3	.3	Wawasan Sosial dan Hukum
400	.5	.4		Peningkatan Kapasitas Pemuda
400	.5	.4	.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
400	.5	.4	.2	Kapasitas IPTEK
400	.5	.4	.3	Pemanfaatan IPTEK
400	.5	.5		Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni)
400	.5	.5	.1	Pengkajian
400	.5	.5	.2	Pengembangan
400	.5	.5	.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
400	.5	.6		Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
400	.5	.6	.1	Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
400	.5	.6	.2	Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
400	.5	.7		Kewirausahaan
400	.5	.7	.1	Kelembagaan
400	.5	.7	.2	Pengaderan
400	.5	.7	.3	Perintisan
400	.5	.8		Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
400	.5	.8	.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumber daya
400	.5	.8	.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumber daya
400	.5	.8	.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran
400	.5	.8	.4	Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumber daya
400	.5	.9		Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
400	.5	.9	.1	Standardisasi
400	.5	.9	.2	Infrastruktur Pemuda
400	.5	.10		Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
400	.5	.10	.1	Kemitraan
400	.5	.10	.2	Penghargaan Pemuda
400	.6			KEBUDAYAAN
400	.6	.1		Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.6	.2		Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
400	.6	.2	.1	Registrasi Nasional
400	.6	.2	.2	Pelindungan
400	.6	.2	.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
400	.6	.2	.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
400	.6	.3		Pembinaan Kesenian dan Perfilman
400	.6	.3	.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
400	.6	.3	.2	Pembinaan Seni Rupa
400	.6	.3	.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
400	.6	.3	.4	Dokumentasi dan Publikasi
400	.6	.4		Sejarah dan Nilai Budaya
400	.6	.4	.1	Sejarah
400	.6	.4	.2	Pemetaan nilai
400	.6	.4	.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
400	.6	.4	.4	Dokumentasi dan Publikasi
400	.6	.4	.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
400	.6	.4	.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
400	.6	.5		Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
400	.6	.5	.1	Internalisasi nilai budaya
400	.6	.5	.2	Kekayaan budaya
400	.6	.5	.3	Warisan budaya nasional dan dunia
400	.6	.5	.4	Diplomasi budaya
400	.7			KESEHATAN
400	.7	.1		Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400	.7	.2		Upaya Kesehatan Dasar
400	.7	.2	.1	Pelayanan kedokteran keluarga
400	.7	.2	.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
400	.7	.2	.3	Pelaksanaan kesehatan primer
400	.7	.2	.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
400	.7	.2	.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
400	.7	.2	.6	ICD 10, Destistry & Stomatology
400	.7	.2	.7	Infeksi menular lewat transfusi darah
400	.7	.2	.8	Penyakit mulut di tingkat primer
400	.7	.2	.9	Pembiayaan darah
400	.7	.2	.10	Penggunaan darah rasional
400	.7	.2	.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
400	.7	.2	.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil
400	.7	.2	.13	Akreditasi puskesmas
400	.7	.2	.14	Puskesmas berprestasi

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.7	.3		Upaya Kesehatan Rujukan
400	.7	.3	.1	Pelayanan kesehatan rujukan
400	.7	.3	.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
400	.7	.3	.3	Pelayanan rumah sakit privat
400	.7	.3	.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
400	.7	.3	.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
400	.7	.3	.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
400	.7	.3	.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
400	.7	.3	.8	Badan pengawas rumah sakit
400	.7	.3	.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanaman Modal Asing (PMA)
400	.7	.3	.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400	.7	.4		Keperawatan dan keteknisian medik
400	.7	.4	.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
400	.7	.4	.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
400	.7	.4	.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
400	.7	.4	.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
400	.7	.4	.5	Bina pelayanan kebidanan
400	.7	.5		Penunjang medik dan sarana kesehatan
400	.7	.5	.1	Mikrobiologi dan imunologi
400	.7	.5	.2	Patologi dan toksilologi
400	.7	.5	.3	Radiologi
400	.7	.5	.4	Perizinan dan sertifikasi
400	.7	.5	.5	Sarana dan prasarana kesehatan
400	.7	.5	.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
400	.7	.5	.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400	.7	.6		Kesehatan Jiwa
400	.7	.6	.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
400	.7	.6	.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
400	.7	.6	.3	Etikolegal dan asesmen
400	.7	.6	.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
400	.7	.6	.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400	.7	.7		Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
400	.7	.7	.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
400	.7	.7	.2	Imunisasi
400	.7	.7	.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
400	.7	.7	.4	Kesehatan matra
400	.7	.8		Pengendalian penyakit menular langsung
400	.7	.8	.1	Pengendalian tuberkolosis
400	.7	.8	.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
400	.7	.8	.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.7	.8	.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
400	.7	.8	.5	Pengendalian kusta dan frambusia
400	.7	.9		Pengendalian penyakit bersumber binatang
400	.7	.9	.1	Pengendalian malaria
400	.7	.9	.2	Pengendalian arbovirosis
400	.7	.9	.3	Pengendalian zoonosis
400	.7	.9	.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400	.7	.10		Pengendalian penyakit tidak menular
400	.7	.10	.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
400	.7	.10	.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
400	.7	.10	.3	Penyakit kanker
400	.7	.10	.4	Penyakit kronis dan generatif
400	.7	.10	.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400	.7	.11		Penyehatan lingkungan
400	.7	.11	.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
400	.7	.11	.2	Pemukiman dan tempat umum
400	.7	.11	.3	Kawasan dan sanitasi darurat
400	.7	.11	.4	Higien sanitasi pangan
400	.7	.11	.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400	.7	.12		Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
400	.7	.13		Gizi
400	.7	.13	.1	Gizi makro
400	.7	.13	.2	Gizi mikro
400	.7	.13	.3	Gizi klinik dan dietetik
400	.7	.13	.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
400	.7	.13	.5	Kewaspadaan gizi
400	.7	.14		Kesehatan ibu
400	.7	.14	.1	Kesehatan ibu hamil
400	.7	.14	.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
400	.7	.14	.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
400	.7	.14	.4	Keluarga berencana
400	.7	.14	.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400	.7	.15		Kesehatan anak
400	.7	.15	.1	Kelangsungan hidup bayi
400	.7	.15	.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
400	.7	.15	.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
400	.7	.15	.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
400	.7	.15	.5	Perlindungan kesehatan anak

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.7	.16		Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
400	.7	.16	.1	Kesehatan tradisional keterampilan
400	.7	.16	.2	Kesehatan tradisional ramuan
400	.7	.16	.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
400	.7	.16	.4	Penapisan dan kemitraan
400	.7	.17		Kesehatan kerja dan Olah raga
400	.7	.17	.1	Pelayanan kesehatan kerja
400	.7	.17	.2	Kapasitas kerja
400	.7	.17	.3	Lingkungan kerja
400	.7	.17	.4	Kemitraan kesehatan kerja
400	.7	.17	.5	Kesehatan perkotaan
400	.7	.17	.6	Kesehatan olahraga
400	.7	.18		Obat Publik dan perbekalan kesehatan
400	.7	.18	.1	Harga obat publik
400	.7	.18	.2	Pengadaan obat
400	.7	.18	.3	Perbekalan kesehatan
400	.7	.19		Produksi dan distribusi alat kesehatan
400	.7	.19	.1	Alat kesehatan
400	.7	.19	.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
400	.7	.19	.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400	.7	.20		Kefarmasian
400	.7	.20	.1	Pelayanan kefarmasian
400	.7	.20	.2	Farmasi klinis
400	.7	.20	.3	Farmasi Komunitas
400	.7	.20	.4	Penggunaan obat rasional
400	.7	.21		Produksi dan distribusi kefarmasian
400	.7	.21	.1	Obat tradisional
400	.7	.21	.2	Kosmetik dan makanan
400	.7	.21	.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
400	.7	.21	.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400	.7	.22		Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
			.1	Surat keterangan
			.2	Sertifikasi dan perijinan
400	.7	.23		Penanggulangan Krisis Kesehatan
400	.7	.23	.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
400	.7	.23	.2	Tanggap darurat dan pemulihan
400	.7	.23	.3	Pemantauan dan informasi
400	.7	.23	.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
400	.7	.23	.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.7	.24		Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
400	.7	.24	.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
400	.7	.24	.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400	.7	.25		Intelegensia Kesehatan
400	.7	.25	.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
400	.7	.25	.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
400	.7	.26		Kesehatan Haji
400	.7	.26	.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
400	.7	.26	.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
400	.7	.27		Promosi Kesehatan
400	.7	.27	.1	Sarana Promosi Kesehatan
400	.7	.27	.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
400	.7	.27	.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
400	.7	.27	.4	Hari Kesehatan
400	.7	.28		Data dan Informasi
400	.7	.28	.1	Statistik kesehatan
400	.7	.28	.2	Analisis dan diseminasi informasi
400	.7	.28	.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
400	.7	.29		Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
400	.7	.29	.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
400	.7	.29	.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
400	.7	.29	.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
400	.7	.29	.4	Obat Asli Indonesia
400	.7	.30		Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
400	.7	.30	.1	Penilaian keamanan pangan
400	.7	.30	.2	Standardisasi produk pangan
400	.7	.30	.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
400	.7	.30	.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
400	.7	.30	.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
400	.7	.31		Rekam Medis
400	.8			AGAMA DAN KEPERCAYAAN
400	.8	.1		Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah
400	.8	.2		Fasilitasi
400	.8	.2	.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
400	.8	.2	.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
400	.8	.2	.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.8	.2	.4	Kasus Keagamaan
400	.8	.2	.5	Kasus Aliran Keagamaan
400	.8	.3		Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
400	.8	.3	.1	Kelembagaan dan kepercayaan
400	.8	.3	.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
400	.8	.3	.3	Komunitas Kepercayaan
400	.8	.3	.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
400	.8	.3	.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400	.9			SOSIAL
400	.9	.1		Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400	.9	.2		Kesejahteraan Sosial Anak
400	.9	.2	.1	Kesejahteraan sosial anak balita
400	.9	.2	.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
400	.9	.2	.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
400	.9	.2	.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kebutuhan khusus
400	.9	.2	.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
400	.9	.3		Rehabilitasi Sosial
400	.9	.3	.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
400	.9	.3	.2	Kelembagaan dan advokasi sosial
400	.9	.3	.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
400	.9	.4		Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
400	.9	.4	.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
400	.9	.4	.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan
400	.9	.4	.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
400	.9	.4	.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas
400	.9	.5		Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
400	.9	.6		Pelayanan sosial lanjut usia
400	.9	.6	.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
400	.9	.6	.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
400	.9	.6	.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
400	.9	.7		Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.9	.8		Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja Migran
400	.9	.9		Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
400	.9	.9	.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
400	.9	.9	.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
400	.9	.9	.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
400	.9	.9	.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
400	.9	.10		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
400	.9	.10	.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
400	.9	.10	.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
400	.9	.10	.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
400	.9	.10	.4	Kerjasama
400	.9	.11		Jaminan Sosial
400	.9	.11	.1	Seleksi dan verifikasi
400	.9	.11	.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
400	.9	.11	.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
400	.9	.11	.4	Kerjasama
400	.9	.12		Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
400	.9	.12	.1	Ketahanan keluarga
400	.9	.12	.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
400	.9	.12	.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
400	.9	.12	.4	Kemitraan dunia usaha
400	.9	.12	.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400	.9	.13		Pemberdayaan komunitas adat terpencil
400	.9	.13	.1	Persiapan pemberdayaan
400	.9	.13	.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
400	.9	.13	.3	Penggalian dan pengembangan potensi
400	.9	.13	.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
400	.9	.13	.5	Kerjasama kelembagaan
400	.9	.14		Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
400	.9	.14	.1	Identifikasi dan analisis
400	.9	.14	.2	Pengembangan kapasitas
400	.9	.14	.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
400	.9	.14	.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
400	.9	.14	.5	Bantuan Langsung
400	.9	.14	.6	Kerjasama Kelembagaan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.9	.15		Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
400	.9	.15	.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
400	.9	.15	.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
400	.9	.15	.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial
400	.9	.15	.4	Pengelolaan taman makam pahlawan
400	.10			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
400	.10	.1		Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400	.10	.2		Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400	.10	.2	.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
400	.10	.2	.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400	.10	.2	.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
400	.10	.2	.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
400	.10	.2	.5	Pengembangan Kapasitas Desa
400	.10	.3		Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
400	.10	.3	.1	Lembaga Masyarakat
400	.10	.3	.2	Pembangunan Partisipatif
400	.10	.3	.3	Pendataan Potensi Masyarakat
400	.10	.3	.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
400	.10	.3	.5	Pelatihan Masyarakat
400	.10	.4		Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
400	.10	.4	.1	Budaya Nusantara
400	.10	.4	.2	Pemberdayaan Perempuan
400	.10	.4	.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
400	.10	.4	.4	Kesejahteraan Sosial
400	.10	.4	.5	Tenaga Kerja Perdesaan
400	.10	.5		Usaha Ekonomi Masyarakat
400	.10	.5	.1	Usaha Pertanian dan Pangan
400	.10	.5	.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
400	.10	.5	.3	Produksi dan Pemasaran
400	.10	.5	.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
400	.10	.5	.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
400	.10	.6		Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
400	.10	.6	.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
400	.10	.6	.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
400	.10	.6	.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
400	.10	.6	.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
400	.10	.6	.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
400	.10	.7		Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.11			PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
400	.11	.1		Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400	.11	.2		Pertamanan
400	.11	.3		Pemakaman
400	.11	.3	.1	Perencanaan Pemakaman
400	.11	.3	.2	Pemakaman
400	.11	.3	.3	Pelayanan Pemakaman
400	.11	.4		Jalur Hijau
400	.11	.5		Peran Serta Masyarakat
400	.11	.6		Pengawasan dan Penindakan
400	.11	.7		Pengelolaan Data
400	.11	.8		Evaluasi dan Pelaporan
400	.12			KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
400	.12	.1		Kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400	.12	.2		Pendaftaran Penduduk
400	.12	.2	.1	Identitas Penduduk
400	.12	.2	.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
400	.12	.2	.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara
400	.12	.2	.4	Pendataan Penduduk Rentan
400	.12	.2	.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400	.12	.3		Pencatatan Sipil
400	.12	.3	.1	Kelahiran dan Kematian
400	.12	.3	.2	Perkawinan dan Perceraian
400	.12	.3	.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak
400	.12	.3	.4	Pencatatan Kewarganegaraan
400	.12	.3	.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400	.12	.4		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
400	.12	.4	.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
400	.12	.4	.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
400	.12	.4	.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
400	.12	.4	.4	Penyajian dan Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan
400	.12	.4	.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.12	.5		Pengembangan Kebijakan Kependudukan
400	.12	.5	.1	Kuantitas Penduduk
400	.12	.5	.2	Kualitas Penduduk
400	.12	.5	.3	Mobilitas Penduduk
400	.12	.5	.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
400	.12	.5	.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
400	.12	.6		Penyerasian Kependudukan
400	.12	.6	.1	Indikator Kependudukan
400	.12	.6	.2	Proyeksi Penduduk
400	.12	.6	.3	Perencanaan Kependudukan
400	.12	.6	.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
400	.12	.6	.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
400	.13			KELUARGA BERENCANA
400	.13	.1		Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400	.13	.2		Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk
400	.13	.2	.1	Pengumpulan dan pengolahan data
400	.13	.2	.2	Evaluasi dan pelaporan
400	.13	.3		Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk
400	.13	.3	.1	Penyiapan fasilitas
400	.13	.3	.2	Evaluasi dan pelaporan
400	.13	.4		Profil dan proyeksi penduduk
400	.13	.4	.1	Data profil dan proyeksi penduduk
400	.13	.4	.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
400	.13	.5		Penetapan parameter pengendalian penduduk
400	.13	.5	.1	Penetapan sasaran parameter
400	.13	.5	.2	Evaluasi sasaran parameter
400	.13	.6		Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
400	.13	.6	.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi
400	.13	.6	.2	Pemanfaatan parameter
400	.13	.7		Pengembangan Sistem
400	.13	.7	.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
400	.13	.7	.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400	.13	.8		Pengembangan Materi
400	.13	.8	.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
400	.13	.8	.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.13	.9		Monitoring dan Evaluasi
400	.13	.9	.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
400	.13	.9	.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400	.13	.10		Analisis Sosial
400	.13	.11		Analisis Ekonomi
400	.13	.12		Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
400	.13	.13		Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
400	.13	.14		Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
400	.13	.15		Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
400	.13	.16		Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
400	.13	.16	.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
400	.13	.16	.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
400	.13	.17		Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
400	.13	.18		Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
400	.13	.19		Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
400	.13	.19	.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
400	.13	.19	.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
400	.13	.20		Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
400	.13	.20	.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
400	.13	.20	.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
400	.13	.21		Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
400	.13	.21	.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
400	.13	.21	.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
400	.13	.22		Kesertaan keluarga berencana pria
400	.13	.22	.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
400	.13	.22	.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
400	.13	.23		Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
400	.13	.24		Pencegahan PMS dan HIV/AIDS

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.13	.25		Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
400	.13	.26		Kelembagaan bina keluarga balita dan anak
400	.13	.26	.1	Pengembangan kelompok bina keluarga balita dan anak
400	.13	.26	.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
400	.13	.26		Kelembagaan bina keluarga Balita dan anak
400	.13	.26	.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
400	.13	.26	.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
400	.13	.27		Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
400	.13	.27	.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
400	.13	.27	.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
400	.13	.28		Kelembagaan bina ketahanan remaja
400	.13	.28	.1	Kelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
400	.13	.28	.2	Kelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
400	.13	.29		Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
400	.13	.29	.1	Monitoring bina ketahanan remaja
400	.13	.29	.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
400	.13	.30		Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400	.13	.30	.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia
400	.13	.30	.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Rentan
400	.13	.31		Kelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400	.13	.31	.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400	.13	.31	.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400	.13	.32		Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400	.13	.32	.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400	.13	.32	.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400	.13	.33		Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
400	.13	.34		Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
400	.13	.35		Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
400	.13	.35	.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
400	.13	.35	.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.13	.36		Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
400	.13	.37		Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
400	.13	.38		Kelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400	.13	.38	.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400	.13	.38	.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400	.13	.39		Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400	.13	.39	.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400	.13	.39	.2	Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400	.13	.40		Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400	.13	.40	.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400	.13	.40	.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400	.13	.41		Advokasi dan pencitraan
400	.13	.42		Komunikasi, Informasi dan Edukasi
400	.13	.42	.1	Promosi
400	.13	.42	.2	Sarana produksi media komunikasi
400	.13	.42	.3	Produk media komunikasi
400	.13	.43		Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
400	.13	.44		Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400	.13	.44	.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400	.13	.44	.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400	.13	.45		Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400	.13	.45	.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400	.13	.45	.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400	.13	.46		Tenaga Lini Lapangan
400	.13	.46	.1	Pengembangan tenaga lini lapangan
400	.13	.46	.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
400	.13	.47		Institusi Masyarakat Pedesaan
400	.13	.47	.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
400	.13	.47	.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
400	.13	.48		Mekanisme Operasional lini lapangan
400	.13	.48	.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
400	.13	.48	.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.13	.49		Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
400	.13	.49	.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
400	.13	.49	.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
400	.13	.50		Pengumpulan dan pengolahan data
400	.13	.51		Analisis dan evaluasi
400	.13	.51	.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
400	.13	.51	.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
400	.13	.52		Sistem aplikasi dan bank data
400	.13	.52	.1	Pengembangan sistem aplikasi
400	.13	.52	.2	Pengelolaan bank data
400	.13	.53		Infrastruktur teknologi informasi
400	.13	.53	.1	Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi
400	.13	.53	.2	Pemeliharaan Infrastruktur teknologi informasi
400	.13	.54		Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
400	.13	.54	.1	Dokumentasi dan perpustakaan
400	.13	.54	.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
400	.14			HUBUNGAN MASYARAKAT
400	.14	.1		Keprotokolan
400	.14	.1	.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian dan jamuan, acara peringatan hari-hari besar)
400	.14	.1	.2	Buku tamu Keprotokolan
400	.14	.1	.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
400	.14	.1	.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
400	.14	.2		Daftar nama/alamat kantor /pejabat
400	.14	.3		Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/ rekaman suara/ multi media
400	.14	.4		Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
400	.14	.4	.1	Kliping koran
400	.14	.4	.2	Brosur /Leaflet/poster /plakat
400	.14	.4	.3	Pengumuman /pemberitaan
400	.14	.5		Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
400	.14	.5	.1	Hubungan antar lembaga pemerintahan
400	.14	.5	.2	Hubungan dengan organisasi sosial/LSM
400	.14	.5	.3	Hubungan dengan perusahaan
400	.14	.5	.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
400	.14	.5	.5	Forum Kehumasan
400	.14	.5	.6	Hubungan dengan Media Massa
400	.14	.6		Dengar pendapat/hearing DPRD
400	.14	.7		Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
400	.14	.8		Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal
400	.14	.9		Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
400	.14	.10		Pameran /sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan
400	.14	.11		Penghargaan/tanda kenang-kenangan
400	.14	.12		Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf
500				PEREKONOMIAN
500	.1			KETAHANAN PANGAN
500	.1	.1		Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.1	.2		Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
500	.1	.2	.1	Ketersediaan Pangan
500	.1	.2	.2	Akses Pangan
500	.1	.2	.3	Kerawanan Pangan
500	.1	.3		Distribusi dan Cadangan Pangan
500	.1	.3	.1	Distribusi Pangan
500	.1	.3	.2	Harga Pangan
500	.1	.3	.3	Cadangan Pangan
500	.1	.4		Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
500	.1	.4	.1	Konsumsi Pangan
500	.1	.4	.2	Penganekaragaman Pangan
500	.1	.4	.3	Keamanan Pangan Segar
500	.1	.5		Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
500	.1	.5	.1	Dewan Ketahanan Pangan
500	.1	.5	.2	Penghargaan Ketahanan Pangan
500	.1	.6		Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
500	.1	.7		Bimbingan Teknis
500	.1	.8		Evaluasi

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.2			PERDAGANGAN
500	.2	.1		Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.2	.2		Perdagangan Dalam Negeri
500	.2	.2	.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
500	.2	.2	.2	Bina Usaha Jasa Perdagangan
500	.2	.2	.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
500	.2	.2	.4	Informasi Perusahaan
500	.2	.2	.5	Pelaku Pasar
500	.2	.2	.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
500	.2	.2	.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
500	.2	.2	.8	Pengembangan Produk Lokal
500	.2	.2	.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
500	.2	.2	.10	Pengembangan Sarana Distribusi
500	.2	.2	.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
500	.2	.2	.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
500	.2	.2	.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
500	.2	.2	.14	Informasi Pasar
500	.2	.2	.15	Informasi Hasil Industri
500	.2	.2	.16	Barang Strategis
500	.2	.2	.17	Bahan Pokok Agro
500	.2	.3		Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
500	.2	.3	.1	Kelembagaan dan informasi standar
500	.2	.3	.2	Kerjasama Standarisasi
500	.2	.3	.3	Perumusan dan penerapan standar
500	.2	.3	.4	Tata usaha
500	.2	.3	.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
500	.2	.3	.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
500	.2	.3	.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
500	.2	.3	.8	Fasilitasi Kelembagaan
500	.2	.3	.9	Produk pertambangan dan aneka industri
500	.2	.3	.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
500	.2	.3	.11	Jasa
500	.2	.3	.12	Kerjasama
500	.2	.3	.13	Sarana dan Kerjasama
500	.2	.3	.14	Kelembagaan dan penilaian
500	.2	.3	.15	UTTP dan Standar Ukuran
500	.2	.3	.16	Pengawasan
500	.2	.3	.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
500	.2	.3	.18	Balai Pengujian UTTP
500	.2	.4		Perdagangan Berjangka Komoditi
500	.2	.4	.1	Pengkajian pasar
500	.2	.4	.2	Pengawasan Transaksi
500	.2	.4	.3	Pengawasan Keuangan dan Audit

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.2	.4	.4	Pengkajian pasar
500	.2	.4	.5	Pengembangan Pasar
500	.2	.4	.6	Sistem informasi
500	.2	.4	.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
500	.2	.4	.8	Pengawasan pasar lelang
500	.2	.4	.9	Pengawasan sistem gudang
500	.2	.5		Bimbingan Teknis
500	.2	.6		Evaluasi
500	.3			KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
500	.3	.1		Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.3	.2		Kelembagaan Koperasi dan UKM
500	.3	.2	.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
500	.3	.2	.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
500	.3	.2	.3	Keanggotaan Koperasi
500	.3	.2	.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
500	.3	.3		Produksi
500	.3	.3	.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
500	.3	.3	.2	Kehutanan dan Perkebunan
500	.3	.3	.3	Perikanan dan Peternakan
500	.3	.3	.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
500	.3	.3	.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
500	.3	.4		Pembiayaan
500	.3	.4	.1	Program Pendanaan
500	.3	.4	.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
500	.3	.4	.3	Urusan Permodalan
500	.3	.4	.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
500	.3	.4	.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
500	.3	.4	.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
500	.3	.5		Pemasaran dan Jaringan Usaha
500	.3	.5	.1	Perdagangan Dalam Negeri
500	.3	.5	.2	Ekspor dan Impor
500	.3	.5	.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
500	.3	.5	.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
500	.3	.5	.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
500	.3	.5	.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
500	.3	.6		Pengembangan Sumber Daya Manusia
500	.3	.6	.1	Pengembangan Kewirausahaan
500	.3	.6	.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.3	.6	.3	Peran Serta Masyarakat
500	.3	.6	.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
500	.3	.6	.5	Advokasi
500	.3	.7		Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
500	.3	.7	.1	Produktifitas dan Mutu
500	.3	.7	.2	Restrukturisasi Usaha
500	.3	.7	.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
500	.3	.7	.4	Fasilitasi Investasi UKMK
500	.3	.7	.5	Pengembangan Sarana Bisnis
500	.3	.8		Pengkajian Sumber Daya UKMK
500	.3	.8	.1	Penelitian Koperasi
500	.3	.8	.2	Penelitian UKM
500	.3	.8	.3	Penelitian Sumber Daya
500	.3	.8	.4	Pengembangan Perkaderan UKM
500	.3	.9		Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
500	.3	.10		Pedagang Kaki Lima (PKL)
500	.3	.10	.1	Peraturan Perundang-Undangan
500	.3	.10	.2	Sarana dan Prasarana
500	.3	.11		Monitoring dan Evaluasi
500	.4			KEHUTANAN
500	.5			KELAUTAN DAN PERIKANAN
500	.5	.1		Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah
500	.5	.2		Perikanan Tangkap
500	.5	.2	.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
500	.5	.2	.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
500	.5	.2	.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
500	.5	.2	.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
500	.5	.2	.5	Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
500	.5	.2	.6	Perbantuan, Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
500	.5	.2	.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
500	.5	.2	.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
500	.5	.2	.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
500	.5	.2	.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
500	.5	.2	.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
500	.5	.2	.12	Kelembagaan Usaha Penangkapan
500	.5	.2	.13	Investasi dan Permodalan Usaha
500	.5	.2	.14	Kenelayanan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.5	.2	.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
500	.5	.2	.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
500	.5	.3		Perikanan Budidaya
500	.5	.3	.1	Potensi Lahan dan Air
500	.5	.3	.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
500	.5	.3	.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
500	.5	.3	.4	Perbenihan Skala Kecil
500	.5	.3	.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
500	.5	.3	.6	Budidaya Air Tawar
500	.5	.3	.7	Budidaya Ikan Hias
500	.5	.3	.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
500	.5	.3	.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
500	.5	.3	.10	Hama dan Penyakit Ikan
500	.5	.3	.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
500	.5	.3	.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
500	.5	.3	.13	Kewirausahaan Budidaya
500	.5	.3	.14	Pelayanan Usaha Budidaya
500	.5	.3	.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
500	.5	.3	.16	Promosi Usaha dan Budaya
500	.5	.4		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
500	.5	.4	.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
500	.5	.4	.2	Pengembangan Produk
500	.5	.4	.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
500	.5	.4	.4	Industri Pengolahan
500	.5	.4	.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
500	.5	.4	.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
500	.5	.4	.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
500	.5	.4	.8	Pengembangan Industri
500	.5	.4	.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
500	.5	.4	.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
500	.5	.4	.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
500	.5	.4	.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
500	.5	.4	.13	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
500	.5	.4	.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
500	.5	.4	.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
500	.5	.4	.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
500	.5	.4	.17	Pengembangan Ekspor
500	.5	.4	.18	Pengembangan Impor
500	.5	.4	.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
500	.5	.4	.20	Pelayanan Usaha
500	.5	.4	.21	Kemitraan Usaha
500	.5	.4	.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
500	.5	.4	.23	Investasi dan Permodalan
500	.5	.4	.24	Informasi dan Promosi

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.5	.5		Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
500	.5	.5	.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yuridiksi
500	.5	.5	.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
500	.5	.5	.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
500	.5	.5	.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
500	.5	.5	.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
500	.5	.5	.6	Konservasi Wawasan
500	.5	.5	.7	Konservasi Jenis Ikan
500	.5	.5	.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
500	.5	.5	.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
500	.5	.5	.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
500	.5	.5	.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
500	.5	.5	.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
500	.5	.5	.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
500	.5	.5	.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
500	.5	.5	.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
500	.5	.5	.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
500	.5	.5	.17	Akses Permodalan
500	.5	.5	.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
500	.5	.5	.19	Sosial Budaya Masyarakat
500	.5	.5	.20	Pengembangan Usaha
500	.5	.6		Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
500	.5	.6	.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
500	.5	.6	.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
500	.5	.6	.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
500	.5	.6	.4	Pengawasan Usaha Budidaya
500	.5	.6	.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
500	.5	.6	.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
500	.5	.6	.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
500	.5	.6	.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati
500	.5	.6	.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
500	.5	.6	.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
500	.5	.6	.11	Perawatan Kapal Pengawas
500	.5	.6	.12	Pengawakan Kapal Pengawas
500	.5	.6	.13	Sistem Pemantauan
500	.5	.6	.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
500	.5	.6	.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
500	.5	.6	.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
500	.5	.6	.17	Penyidikan
500	.5	.6	.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
500	.5	.6	.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
500	.5	.6	.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
500	.5	.7		Karantina Ikan
500	.5	.7	.1	Pemeriksaan Ikan
500	.5	.7	.2	Penahanan
500	.5	.7	.3	Pengasin

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.5	.7	.4	Pengamatan
500	.5	.7	.5	Pengakuan
500	.5	.7	.6	Penolakan
500	.5	.7	.7	Pemusnahan
500	.5	.7	.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
500	.5	.7	.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
500	.5	.7	.10	Permohonan Sertifikat
500	.5	.7	.11	Pemasukan Formulir
500	.5	.7	.12	Pemasukan Sertifikat
500	.5	.7	.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
500	.5	.7	.14	Surat Perintah
500	.5	.7	.15	Rekomendasi
500	.5	.7	.16	Penutupan Suatu Area
500	.5	.7	.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
500	.5	.7	.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
500	.5	.7	.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
500	.5	.7	.20	Instalasi Karantina Sementara
500	.5	.7	.21	Lokasi Karantina
500	.6			PERTANIAN
500	.6	.1		Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.6	.2		Perlindungan hortikultura
500	.6	.2	.1	Perlindungan Tanaman Buah
500	.6	.2	.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
500	.6	.2	.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
500	.6	.2	.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
500	.6	.3		Perbenihan Hortikultura
500	.6	.3	.1	Penilaian Varietas
500	.6	.3	.2	Pengawasan Mutu Benih
500	.6	.3	.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
500	.6	.4		Perluasan dan Pengelolaan Lahan
500	.6	.4	.1	Basis Data Lahan
500	.6	.4	.2	Pengendalian Lahan
500	.6	.4	.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
500	.6	.4	.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
500	.6	.4	.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
500	.6	.5		Pengelolaan Air Irigasi
500	.6	.5	.1	Pengembangan Sumber Air
500	.6	.5	.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi air
500	.6	.5	.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
500	.6	.5	.4	Kelembagaan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.6	.6		Pembiayaan Pertanian
500	.6	.6	.1	Pembiayaan Program
500	.6	.6	.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
500	.6	.6	.3	Pembiayaan agribisnis
500	.6	.6	.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
500	.6	.7		Pupuk Pestisida
500	.6	.7	.1	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah
500	.6	.7	.2	Pupuk Anorganik
500	.6	.7	.3	Pestisida
500	.6	.7	.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500	.6	.8		Alat dan Mesin Pertanian
500	.6	.8	.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
500	.6	.8	.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
500	.6	.8	.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500	.6	.9		Perbenihan Tanaman Pangan
500	.6	.9	.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
500	.6	.9	.2	Produksi Benih Serealia
500	.6	.9	.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
500	.6	.9	.4	Kelembagaan Benih
500	.6	.10		Budidaya Serealia
500	.6	.10	.1	Padi Irigasi dan Rawa
500	.6	.10	.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
500	.6	.10	.3	Jagung
500	.6	.10	.4	Serealia lain
500	.6	.11		Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
500	.6	.11	.1	Kedelai
500	.6	.11	.2	Ubi Kayu
500	.6	.11	.3	Aneka Kacang
500	.6	.11	.4	Aneka Umbi
500	.6	.12		Tanaman Pangan
500	.6	.12	.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
500	.6	.12	.2	Dampak perubahan iklim
500	.6	.12	.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
500	.6	.12	.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu
500	.6	.13		Pasca Panen Tanaman Pangan
500	.6	.13	.1	Padi
500	.6	.13	.2	Jagung dan Serealia lain
500	.6	.13	.3	Kedelai dan Aneka Kacang
500	.6	.13	.4	Aneka Umbi

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.6	.14		Pengolahan Hasil Pertanian
500	.6	.14	.1	Tanaman Pangan
500	.6	.14	.2	Hortikultura
500	.6	.14	.3	Perkebunan
500	.6	.14	.4	Peternakan
500	.6	.15		Mutu dan Standarisasi
500	.6	.15	.1	Standarisasi
500	.6	.15	.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
500	.6	.15	.3	Akreditasi dan Kelembagaan
500	.6	.15	.4	Kerjasama dan Harmonisasi
500	.6	.16		Pengembangan Usaha dan Investasi
500	.6	.16	.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
500	.6	.16	.2	Investasi
500	.6	.16	.3	Promosi Dalam Negeri
500	.6	.16	.4	Promosi Luar Negeri
500	.6	.17		Pemasaran Domestik
500	.6	.17	.1	Informasi Pasar
500	.6	.17	.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
500	.6	.17	.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
500	.6	.17	.4	Jaringan Pemasaran
500	.6	.18		Administrasi Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat
500	.6	.19		Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500	.6	.19	.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
500	.6	.19	.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500	.6	.20		Diseminasi
500	.6	.21		Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
500	.6	.21	.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
500	.6	.21	.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
500	.6	.22		Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500	.6	.23		Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500	.6	.24		Data Penelitian dan Pengembangan
500	.6	.25		Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.6	.26		Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
500	.6	.26	.1	Hak Cipta
500	.6	.26	.2	Hak Paten Sederhana
500	.6	.26	.3	Hak Paten biasa
500	.6	.26	.4	Hak Merek
500	.6	.26	.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
500	.6	.26	.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
500	.6	.26	.7	Permohonan HKI yang ditolak
500	.6	.27		Pelayanan Perijinan Pertanian
500	.6	.27	.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
500	.6	.27	.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
500	.6	.27	.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
500	.6	.28		Pelayanan Hukum
500	.6	.28	.1	Sertifikasi
500	.6	.28	.2	Pertimbangan Hukum
500	.6	.29		Karantina Pertanian
500	.6	.29	.1	Karantina Tumbuhan
500	.6	.29	.2	Karantina Hewan
500	.6	.30		Bimbingan Teknis
500	.6	.31		Evaluasi
500	.7			PETERNAKAN
500	.7	.1		Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.7	.2		Peternakan dan Kesehatan Hewan
500	.7	.2	.1	Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
500	.7	.2	.2	Pakan Ternak
500	.7	.2	.3	Budidaya Ternak
500	.7	.2	.4	Kesehatan Hewan, antara lain : Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.7	.2	.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
500	.7	.3		Bimbingan Teknis
500	.7	.4		Evaluasi
500	.8			PERKEBUNAN
500	.8	.1		Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.8	.2		Tanaman Semusim
500	.8	.2	.1	Identifikasi dan Pendayagunaan sumber daya tanaman semusim
500	.8	.2	.2	Perbenihan Tanaman Semusim
500	.8	.2	.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
500	.8	.2	.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
500	.8	.3		Tanaman Rempah dan Penyegar
500	.8	.3	.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar
500	.8	.3	.2	Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar
500	.8	.3	.3	Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar
500	.8	.3	.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar
500	.8	.4		Tanaman Tahunan
500	.8	.4	.1	Identifikasi dan Pendayagunaan sumber daya tanaman tahunan
500	.8	.4	.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
500	.8	.4	.3	Budidaya Tanaman Tahunan
500	.8	.4	.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
500	.8	.5		Perlindungan Perkebunan
500	.8	.5	.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
500	.8	.5	.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
500	.8	.5	.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
500	.8	.5	.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
500	.8	.6		Pascapanen dan Pembinaan Usaha
500	.8	.6	.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
500	.8	.6	.2	Pascapanen Tanaman Tahunan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.8	.6	.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
500	.8	.6	.4	Gangguan Usaha dan Penanganan konflik
500	.8	.7		Bimbingan Teknis Perkebunan
500	.8	.8		Evaluasi Perkebunan
500	.9			PERINDUSTRIAN
500	.9	.1		Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.9	.2		Iklm Usaha dan Kerja Sama
500	.9	.2	.1	Industri Manufaktur
500	.9	.2	.2	Industri Agro
500	.9	.2	.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500	.9	.2	.4	Industri Kecil dan Menengah
500	.9	.3		Promosi Industri
500	.9	.3	.1	Industri Manufaktur
500	.9	.3	.2	Promosi Industri Agro
500	.9	.3	.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500	.9	.3	.4	Industri Kecil dan Menengah
500	.9	.4		Standarisasi dan Teknologi
500	.9	.4	.1	Industri Manufaktur
500	.9	.4	.2	Industri Agro
500	.9	.4	.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500	.9	.4	.4	Industri Kecil dan Menengah
500	.9	.5		Hak dan Kekayaan Intelektual
500	.9	.5	.1	Industri Manufaktur
500	.9	.5	.2	Industri Agro
500	.9	.5	.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi
500	.9	.5	.4	Industri Kecil dan Menengah
500	.9	.6		Industri Hijau
500	.9	.6	.1	Industri Manufaktur
500	.9	.6	.2	Industri Agro
500	.9	.6	.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500	.9	.6	.4	Industri Kecil dan Menengah
500	.9	.7		Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
500	.9	.8		Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.9	.9		Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
500	.9	.10		Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
500	.9	.11		Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
500	.9	.12		Standarisasi
500	.9	.12	.1	Standar
500	.9	.12	.2	Penyiapan Penerapan
500	.9	.12	.3	Infrastruktur Standar
500	.9	.13		Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
500	.9	.13	.1	Kebijakan Industri
500	.9	.13	.2	Perpajakan dan Tarif
500	.9	.13	.3	Pengembangan Model Industrial
500	.9	.14		Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
500	.9	.14	.1	Industri Hijau
500	.9	.14	.2	Lingkungan Hidup
500	.9	.14	.3	Energi
500	.9	.15		Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
500	.9	.15	.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
500	.9	.15	.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
500	.9	.15	.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500	.9	.16		Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
500	.10			ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
500	.10	.1		Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.11			PERHUBUNGAN
500	.11	.1		Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.11	.2		Jaringan Prasarana dan Pelayanan
500	.11	.2	.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
500	.11	.2	.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
500	.11	.2	.3	Penetapan lokasi terminal barang utama
500	.11	.2	.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
500	.11	.2	.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.11	.2	.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
500	.11	.2	.7	Penetapan kelas jalan primer
500	.11	.2	.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
500	.11	.2	.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
500	.11	.3		Pengembangan Transportasi Jalan
500	.11	.3	.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
500	.11	.3	.2	Pengembangan transportasi jalan
500	.11	.4		Pengujian Kendaraan Bermotor
500	.11	.4	.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
500	.11	.4	.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
500	.11	.4	.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
500	.11	.4	.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
500	.11	.5		Teknologi Kendaraan Bermotor
500	.11	.5	.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
500	.11	.5	.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
500	.11	.5	.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
500	.11	.5	.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
500	.11	.6		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
500	.11	.6	.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
500	.11	.6	.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
500	.11	.7		Perlengkapan Jalan
500	.11	.7	.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
500	.11	.7	.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
500	.11	.7	.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
500	.11	.7	.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
500	.11	.7	.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
500	.11	.8		Angkutan Penumpang
500	.11	.8	.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
500	.11	.8	.2	Izin trayek angkutan penumpang trayek lintas batas negara
500	.11	.8	.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
500	.11	.8	.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara dan antar kota/provinsi
500	.11	.8	.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
500	.11	.8	.6	Pemberian subsidi angkutan umum
500	.11	.8	.7	Angkutan perintis
500	.11	.8	.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.11	.9		Angkutan Barang
500	.11	.9	.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
500	.11	.9	.2	Tarif angkutan barang
500	.11	.9	.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
500	.11	.9	.4	Pembinaan angkutan barang
500	.11	.9	.5	Izin dispensasi angkutan jalan
500	.11	.10		Monitoring Operasional
500	.11	.10	.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan angkutan jalan
500	.11	.10	.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
500	.11	.10	.3	Berkas Pelanggaran Perda
500	.11	.11		Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500	.11	.11	.1	Pedoman Teknis
500	.11	.11	.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500	.11	.11	.3	Bimtek PPNS
500	.11	.11	.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500	.11	.12		Analisa dan Evaluasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
500	.11	.13		Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
500	.11	.14		Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau,
500	.11	.15		Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
500	.11	.16		Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
500	.11	.17		Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan Penyeberangan
500	.11	.18		Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
500	.11	.19		Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau Penyeberangan
500	.11	.20		Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
500	.11	.21		Tarif dan Keperintisan
500	.11	.22		Bina Sistem Transportasi Perkotaan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.11	.23		Lalu Lintas Perkotaan
500	.11	.24		Angkutan Perkotaan
500	.11	.26		Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
500	.11	.27		Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan
500	.11	.28		Pengembangan Keselamatan
500	.11	.29		Promosi dan Kemitraan Keselamatan
500	.11	.30		Bina Keselamatan Angkutan Umum
500	.11	.31		Audit Keselamatan
500	.11	.32		Inspeksi Keselamatan
500	.11	.33		Parkir
500	.12			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
500	.12	.1		Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.12	.2		Telekomunikasi
500	.12	.2	.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
500	.12	.2	.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
500	.12	.2	.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
500	.12	.2	.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
500	.12	.3		Penyiaran
500	.12	.3	.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500	.12	.3	.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500	.12	.4		Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, Kewajiban Universal
500	.12	.4	.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
500	.12	.4	.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
500	.12	.4	.3	Layanan Khusus Penyiaran
500	.12	.4	.4	Pelayanan Kewajiban Universal
500	.12	.4	.5	Pengembangan Infrastruktur
500	.12	.5		Pengendalian Informatika
500	.12	.5	.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
500	.12	.5	.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
500	.12	.5	.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
500	.12	.5	.4	Pencegahan dan Penertiban

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.12	.6		e- Government
500	.12	.6	.1	Tata Kelola e-Government
500	.12	.6	.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
500	.12	.6	.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
500	.12	.6	.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
500	.12	.6	.5	Aplikasi Layanan Publik
500	.12	.7		e- Business
500	.12	.7	.1	Tata Kelola e-Business
500	.12	.7	.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
500	.12	.7	.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
500	.12	.7	.4	Aplikasi Layanan e-Business
500	.12	.8		Pemberdayaan Informatika Masyarakat
500	.12	.8	.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
500	.12	.8	.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500	.12	.9		Pemberdayaan Industri Informatika
500	.12	.9	.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
500	.12	.9	.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
500	.12	.9	.3	Industri Perangkat Lunak
500	.12	.9	.4	Industri Konten Multimedia
500	.12	.10		Keamanan Informasi
500	.12	.10	.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
500	.12	.10	.2	Teknologi Keamanan Informasi
500	.12	.10	.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
500	.12	.10	.4	Penyidikan dan Penindakan
500	.12	.10	.5	Budaya Keamanan Informasi
500	.12	.11		Komunikasi Publik
500	.12	.11	.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
500	.12	.11	.2	Pengelolaan Opini Publik
500	.12	.11	.3	Layanan Komunikasi Publik
500	.12	.12		Pengolahan dan Penyediaan Informasi
500	.12	.12	.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
500	.12	.12	.2	Informasi Perekonomian
500	.12	.12	.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500	.12	.13		Pengelolaan Media Publik
500	.12	.13	.1	Media Cetak
500	.12	.13	.2	Media Online
500	.12	.13	.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.12	.14		Kemitraan Komunikasi
500	.12	.14	.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
500	.12	.14	.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
500	.12	.14	.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
500	.12	.15		Infrastruktur Informatika
500	.12	.15	.1	Jaringan
500	.12	.15	.2	Piranti Teknologi Informatika
500	.12	.15	.3	Keamanan Informasi
500	.12	.16		Sistem dan Data
500	.12	.16	.1	Portal dan Konten
500	.12	.16	.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
500	.12	.16	.3	Pengembangan Aplikasi
500	.12	.17		Pusat Kerjasama
500	.12	.17	.1	Kerjasama daerah
500	.12	.17	.2	Kerjasama Bilateral
500	.12	.18		Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
500	.12	.18	.1	Pelayanan Informasi
500	.12	.18	.2	Hubungan Masyarakat
500	.12	.18	.3	Bimbingan Teknis
500	.12	.19		Evaluasi
500	.13			PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
500	.13	.1		Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.13	.2		Pengembangan Destinasi Wisata
500	.13	.2	.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
500	.13	.2	.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
500	.13	.2	.3	Industri Pariwisata
500	.13	.2	.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
500	.13	.2	.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, Event
500	.13	.3		Pemasaran Pariwisata
500	.13	.3	.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
500	.13	.3	.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
500	.13	.3	.3	Pencitraan Indonesia
500	.13	.4		Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
500	.13	.4	.1	Pengembangan industri Perfilman
500	.13	.4	.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
500	.13	.4	.3	Pengembangan Seni Rupa

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.13	.5		Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
500	.13	.5	.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
500	.13	.5	.2	Desain dan Arsitektur
500	.13	.5	.3	Kerjasama dan Fasilitasi
500	.13	.6		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
500	.13	.6	.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
500	.13	.6	.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
500	.13	.6	.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500	.13	.6	.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500	.14			STATISTIK
500	.14	.1		Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.14	.2		Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
500	.14	.3		Survei
500	.14	.4		Konsolidasi Data Statistik
500	.14	.5		Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik
500	.15			KETENAGAKERJAAN
500	.15	.1		Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.15	.2		Perencanaan Tenaga Kerja
500	.15	.2	.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
500	.15	.2	.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500	.15	.3		Pengembangan Standarisasi Kompetensi
500	.15	.3	.1	Penerapan Standar Kompetensi
500	.15	.3	.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
500	.15	.3	.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
500	.15	.3	.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
500	.15	.3	.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500	.15	.4		Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
500	.15	.4	.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
500	.15	.4	.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
500	.15	.4	.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
500	.15	.4	.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.15	.5		Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
500	.15	.5	.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
500	.15	.5	.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
500	.15	.5	.3	Tenaga Pelatihan
500	.15	.5	.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
500	.15	.6		Bina Pemagangan
500	.15	.6	.1	Pemagangan Dalam Negeri
500	.15	.6	.2	Pemagangan Luar Negeri
500	.15	.6	.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
500	.15	.6	.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
500	.15	.7		Produktivitas dan Kewirausahaan
500	.15	.7	.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
500	.15	.7	.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
500	.15	.7	.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
500	.15	.7	.4	Pengembangan Kewirausahaan
500	.15	.8		Pengembangan Pasar Kerja
500	.15	.8	.1	Informasi Pasar Kerja
500	.15	.8	.2	Analisis Pasar Kerja
500	.15	.8	.3	Bursa Kerja
500	.15	.8	.4	Analisis Jabatan
500	.15	.9		Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
500	.15	.9	.1	Antar Kerja
500	.15	.9	.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
500	.15	.9	.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
500	.15	.9	.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
500	.15	.10		Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
500	.15	.10	.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
500	.15	.10	.2	Pengembangan Padat Karya
500	.15	.10	.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
500	.15	.10	.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
500	.15	.11		Standardisasi Profesi
500	.15	.11	.1	Sistem Informasi dan Registrasi
500	.15	.11	.2	Pembakuan Akreditasi
500	.15	.12		Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
500	.15	.12	.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama
500	.15	.12	.2	Perjanjian Kerja
500	.15	.12	.3	Kesejahteraan Pekerja
500	.15	.12	.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.15	.13		Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500	.15	.13	.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
500	.15	.13	.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
500	.15	.13	.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500	.15	.14		Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500	.15	.14	.1	Pengupahan
500	.15	.14	.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Hubungan Kerja
500	.15	.15		Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
500	.15	.15	.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
500	.15	.15	.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500	.15	.15	.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500	.15	.16		Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
500	.15	.16	.1	Pengawasan Norma Kerja
500	.15	.16	.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
500	.15	.16	.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500	.15	.17		Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
500	.15	.17	.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
500	.15	.17	.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
500	.15	.17	.3	Kerjasama Lintas Sektoral
500	.15	.17	.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500	.15	.18		Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500	.15	.18	.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
500	.15	.18	.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
500	.15	.18	.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
500	.15	.18	.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
500	.15	.18	.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
500	.15	.19		Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
500	.15	.20		Bina Penegakan Hukum
500	.15	.20	.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
500	.15	.20	.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
500	.15	.20	.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500	.15	.20	.4	Kerjasama Penegakan Hukum
500	.15	.21		Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
500	.15	.21	.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3
500	.15	.21	.2	Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.15	.21	.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
500	.15	.21	.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K 3
500	.15	.22		Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500	.15	.22	.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500	.15	.22	.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM, Kompetensi K3
500	.15	.22	.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500	.15	.22	.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500	.15	.22	.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500	.15	.22	.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500	.16			PENANAMAN MODAL
500	.16	.1		Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.16	.2		Perencanaan Penanaman Modal
500	.16	.2	.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
500	.16	.2	.2	Perencanaan Industri Manufaktur
500	.16	.2	.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
500	.16	.2	.4	Perencanaan Infrastruktur
500	.16	.3		Pengembangan Iklim Penanaman Modal
500	.16	.3	.1	Deregulasi Penanaman Modal
500	.16	.3	.2	Pengembangan Potensi Daerah
500	.16	.3	.3	Pemberdayaan Usaha
500	.16	.3	.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
500	.16	.3	.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
500	.16	.3	.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
500	.16	.4		Promosi Penanaman Modal
500	.16	.4	.1	Pengembangan Promosi
500	.16	.4	.2	Analisis Strategi Promosi
500	.16	.4	.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
500	.16	.4	.4	Promosi Sektoral
500	.16	.4	.5	Fasilitasi Promosi Daerah
500	.16	.4	.6	Pameran dan Sarana Promosi
500	.16	.5		Kerja Sama Penanaman Modal
500	.16	.5	.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
500	.16	.5	.2	Kerja Sama Regional
500	.16	.5	.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.16	.6		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
500	.16	.6	.1	Pemantauan Penanaman Modal
500	.16	.6	.2	Data Realisasi Penanaman Modal
500	.16	.6	.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
500	.16	.6	.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
500	.16	.6	.5	Pengawasan Penanaman Modal
500	.16	.6	.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
500	.16	.7		Pelayanan Penanaman Modal
500	.16	.7	.1	Pelayanan Aplikasi
500	.16	.7	.2	Pelayanan Perijinan
500	.16	.7	.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan
500	.16	.7	.4	Pelayanan Non Perijinan
500	.16	.7	.5	Pelayanan Fasilitas
500	.17			PERTANAHAN
500	.17	.1		Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.17	.2		Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
500	.17	.2	.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
500	.17	.2	.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
500	.17	.2	.3	Data dan Informasi Pertanahan
500	.17	.2	.4	Advokasi dan Pengendalian
500	.18			TRANSMIGRASI
500	.18	.1		Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500	.18	.2		Penyediaan Tanah Transmigrasi
500	.18	.2	.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
500	.18	.2	.2	Pengurusan Legalitas Tanah
500	.18	.2	.3	Dokumentasi Pertanahan
500	.18	.2	.4	Advokasi Pertanahan
500	.18	.3		Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
500	.18	.3	.1	Penyiapan Lahan
500	.18	.3	.2	Penyiapan Sarana
500	.18	.3	.3	Penyiapan Prasarana
500	.18	.3	.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman
500	.18	.4		Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
500	.18	.4	.1	Penyiapan Calon Transmigrasi
500	.18	.4	.2	Penyiapan Perpindahan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
500	.18	.4	.3	Pelaksanaan Perpindahan
500	.18	.4	.4	Penataan dan Adaptasi
500	.18	.5		Partisipasi Masyarakat
500	.18	.5	.1	Promosi dan Motivasi
500	.18	.5	.2	Kerjasama Kelembagaan
500	.18	.5	.3	Kerjasama Antar Daerah
500	.18	.5	.4	Pelayanan Investasi
500	.18	.6		Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
500	.18	.6	.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
500	.18	.6	.2	Bina Sistem Informasi
500	.18	.6	.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan
500	.18	.6	.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat
500	.18	.6	.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
500	.18	.7		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
500	.18	.7	.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan
500	.18	.7	.2	Fasilitas Sosial Budaya
500	.18	.7	.3	Pengembangan Kelembagaan
500	.18	.7	.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
500	.18	.8		Pengembangan Usaha
500	.18	.8	.1	Kewirausahaan
500	.18	.8	.2	Produksi
500	.18	.8	.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
500	.18	.8	.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan
500	.18	.9		Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
500	.18	.9	.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
500	.18	.9	.2	Pengembangan Sarana
500	.18	.9	.3	Pengembangan Prasarana
500	.18	.9	.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
500	.18	.10		Penyerasian Lingkungan
500	.18	.10	.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
500	.18	.10	.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
500	.18	.10	.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
500	.18	.10	.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
600				PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
600	.1			PEKERJAAN UMUM
600	.1	.1		Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
600	.1	.2		Penatagunaan Sumber Daya Air
600	.1	.2	.1	Perencanaan Wilayah Sungai
600	.1	.2	.2	Kelembagaan
600	.1	.2	.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air
600	.1	.2	.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
600	.1	.2	.5	Pengaturan dan Pemantauan
600	.1	.3		Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
600	.1	.3	.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
600	.1	.3	.2	Manajemen Mutu
600	.1	.3	.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
600	.1	.3	.4	Keterpaduan Pemrograman
600	.1	.4		Pengelolaan Sumber Daya Air
600	.1	.4	.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
600	.1	.4	.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
600	.1	.4	.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
600	.1	.4	.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
600	.1	.5		Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
600	.1	.5	.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
600	.1	.5	.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
600	.1	.5	.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, Embung
600	.1	.5	.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
600	.1	.5	.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur
600	.1	.7		Pengembangan Jaringan Jalan
600	.1	.7	.1	Keterpaduan Perencanaan
600	.1	.7	.2	Sistem Jaringan Jalan
600	.1	.7	.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600	.1	.8		Pembangunan Jalan
600	.1	.8	.1	Standar dan Pedoman
600	.1	.8	.2	Manajemen Konstruksi
600	.1	.8	.3	Pengelolaan Geometrik, Perkerasan, dan Drainage
600	.1	.8	.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600	.1	.9		Preservasi Jalan
600	.1	.9	.1	Standar dan Pedoman
600	.1	.9	.2	Perencanaan Teknis
600	.1	.9	.3	Teknik Rekonstruksi
600	.1	.9	.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600	.1	.10		Pengelolaan Jembatan
600	.1	.10	.1	Standar dan Pedoman
600	.1	.10	.2	Perencanaan Teknis

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
600	.1	.10	.3	Teknik Jembatan
600	.1	.10	.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600	.1	.11		Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
600	.1	.11	.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
600	.1	.11	.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
600	.1	.11	.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600	.1	.13		Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
600	.1	.13	.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
600	.1	.13	.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600	.1	.14		Pengembangan Kawasan Permukiman
600	.1	.14	.1	Perencanaan Teknis
600	.1	.14	.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
600	.1	.14	.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
600	.1	.14	.4	Kawasan Permukiman Khusus
600	.1	.14	.5	Kelembagaan
600	.1	.15		Pembinaan Penataan Bangunan
600	.1	.15	.1	Perencanaan Teknis
600	.1	.15	.2	Penataan Bangunan Gedung
600	.1	.15	.3	Pengelolaan Rumah Negara
600	.1	.15	.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
600	.1	.15	.5	Kelembagaan
600	.1	.16		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
600	.1	.16	.1	Perencanaan Teknis
600	.1	.16	.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
600	.1	.16	.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
600	.1	.16	.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
600	.1	.16	.5	Kelembagaan
600	.1	.16	.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
600	.1	.16	.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600	.1	.17		Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
600	.1	.17	.1	Perencanaan Teknis
600	.1	.17	.2	Pengelolaan Air Limbah
600	.1	.17	.3	Pengelolaan Persampahan
600	.1	.17	.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
600	.1	.17	.5	Kelembagaan
600	.1	.17	.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600	.1	.18		Pemantauan dan Evaluasi

Vt

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
600	.2			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
600	.2	.1		Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600	.2	.2		Perencanaan Pembiayaan Perumahan
600	.2	.2	.1	Keterpaduan Perencanaan
600	.2	.2	.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar
600	.2	.2	.3	Kemitraan
600	.2	.3		Pola Pembiayaan Perumahan
600	.2	.3	.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
600	.2	.3	.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
600	.2	.3	.3	Pola Investasi Perumahan
600	.2	.4		Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
600	.2	.4	.1	Sumber Pembiayaan Primer
600	.2	.4	.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
600	.2	.4	.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
600	.2	.4	.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
600	.2	.4	.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
600	.2	.5		Perencanaan Penyediaan Perumahan
600	.2	.5	.1	Keterpaduan Perencanaan
600	.2	.5	.2	Analisa Teknik
600	.2	.5	.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
600	.2	.5	.4	Kemitraan dan Kelembagaan
600	.2	.6		Penyediaan Rumah Susun
600	.2	.6	.1	Perencanaan Teknik
600	.2	.6	.2	Penyediaan
600	.2	.6	.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
600	.2	.6	.4	Pengelolaan Rumah Susun
600	.2	.7		Penyediaan Rumah Khusus
600	.2	.7	.1	Perencanaan Teknik
600	.2	.7	.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
600	.2	.7	.3	Bimbingan teknis dan supervisi
600	.2	.7	.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
600	.2	.7	.5	Perencanaan Teknik
600	.2	.7	.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
600	.2	.7	.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600	.2	.8		Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
600	.2	.8	.1	Perencanaan Teknik
600	.2	.8	.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
600	.2	.8	.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
600	.2	.8	.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
600	.2	.9		Investasi Infrastruktur
600	.2	.9	.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
600	.2	.9	.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
600	.2	.9	.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
600	.2	.9	.4	Pasar Infrastruktur
600	.2	.10		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
600	.2	.10	.1	Sistem Penyelenggaraan
600	.2	.10	.2	Kontrak Konstruksi
600	.2	.10	.3	Konstruksi Berkelanjutan
600	.2	.10	.4	Manajemen Mutu
600	.2	.11		Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
600	.2	.11	.1	Kelembagaan
600	.2	.11	.2	Material dan Peralatan Konstruksi
600	.2	.11	.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
600	.2	.11	.4	Usaha Jasa Konstruksi
600	.2	.12		Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
600	.2	.12	.1	Standar dan Materi Kompetensi
600	.2	.12	.2	Penerapan Kompetensi
600	.2	.12	.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
600	.2	.12	.4	Pengembangan Produktivitas
600	.2	.13		Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600	.2	.13	.1	Peningkatan Kerjasama
600	.2	.13	.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600	.2	.14		Peningkatan Jasa Konstruksi
600	.2	.14	.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
600	.2	.14	.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600	.2	.15		Penerapan Teknologi Konstruksi
600	.2	.15	.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
600	.2	.15	.2	Pengembangan Materi
600	.2	.15	.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600	.2	.16		Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan
600	.2	.16	.1	Rakyat (PUPR)
600	.2	.16	.2	Antar Sektor
600	.2	.16	.3	Antar Wilayah
600	.2	.17		Pengembangan Kawasan Strategis
600	.2	.17	.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
600	.2	.17	.2	Pengembangan Infrastruktur antar Kawasan Strategis
600	.2	.18		Pengembangan Kawasan Perkotaan
600	.2	.18	.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
600	.2	.18	.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
600	.2	.18	.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat
600	.2	.19		Pemantauan dan Evaluasi
600	.3			TATA RUANG (TATA KOTA)
600	.3	.1		Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintah Daerah
600	.3	.2		Perencanaan
600	.3	.2	.1	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW)
600	.3	.2	.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
600	.3	.2	.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
600	.3	.2	.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
600	.3	.2	.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
600	.3	.2	.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
600	.3	.2	.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Prasarana Kota
600	.3	.3		Pemanfaatan dan Pengendalian
600	.3	.3	.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
600	.3	.3	.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
600	.3	.3	.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
600	.3	.4		Pemetaan
600	.3	.4	.1	Peta Dasar
600	.3	.4	.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
600	.3	.4	.3	Survey Pemetaan Ruang Air
600	.3	.4	.4	Survey Pemetaan Ruang Udara
600	.4			LINGKUNGAN HIDUP
600	.4	.1		Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600	.4	.2		Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
600	.4	.2	.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
600	.4	.2	.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
600	.4	.3		Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
600	.4	.3	.1	Evaluasi Penerapan
600	.4	.3	.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
600	.4	.4		Ekonomi Lingkungan

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
600	.4	.5		Dampak Lingkungan
600	.4	.5	.1	Bimtek Dampak Lingkungan
600	.4	.5	.2	Penerapan sistem kebijakan dampak lingkungan
600	.4	.5	.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600	.4	.6		Pemantauan dan Pengawasan
600	.4	.6	.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
600	.4	.6	.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
600	.4	.6	.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
600	.4	.6	.4	Udara Sumber Bergerak
600	.4	.7		Evaluasi dan Pengembangan
600	.4	.7	.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
600	.4	.7	.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
600	.4	.7	.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
600	.4	.7	.4	Udara Sumber Bergerak
600	.4	.8		Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
600	.4	.8	.1	Pengembangan
600	.4	.8	.2	Pemanfaatan
600	.4	.8	.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
600	.4	.8	.4	Keamanan Hayati
600	.4	.8	.5	Pengendalian kerusakan Lahan
600	.4	.9		Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
600	.4	.9	.1	Kerusakan Ekosistem
600	.4	.9	.2	Rawa
600	.4	.10		Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
600	.4	.10	.1	Perangkat mitigasi
600	.4	.10	.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
600	.4	.10	.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
600	.4	.10	.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600	.4	.11		Adaptasi Perubahan Iklim
600	.4	.11	.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
600	.4	.11	.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600	.4	.12		Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
600	.4	.12	.1	Registrasi dan Notifikasi
600	.4	.12	.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
600	.4	.12	.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600	.4	.13		Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun
600	.4	.13	.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
600	.4	.13	.2	Pengangkutan dan Pengolahan
600	.4	.13	.3	Penimbunan dan Dumping
600	.4	.13	.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas

Vf

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
600	.4	.14		Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
600	.4	.14	.1	Pemantauan
600	.4	.14	.2	Tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi
600	.4	.15		Pengelolaan Sampah
600	.4	.15	.1	Pembatasan sampah
600	.4	.15	.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
600	.4	.15	.3	Pembentukan Dewan Adipura
600	.4	.15	.4	Penetapan pemenang adipura
600	.4	.16		Hukum Administrasi Lingkungan
600	.4	.16	.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
600	.4	.16	.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
600	.4	.17		Penyelesaian Sengketa Lingkungan
600	.4	.17	.1	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
600	.4	.17	.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600	.4	.18		Penegakan hukum pidana lingkungan
600	.4	.18	.1	Penyidikan
600	.4	.18	.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
600	.4	.18	.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600	.4	.19		Komunikasi Lingkungan
600	.4	.19	.1	Pengembangan Komunikasi
600	.4	.19	.2	Publikasi dan Kampanye
600	.4	.20		Penguatan Inisiatif Masyarakat
600	.4	.20	.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
600	.4	.20	.2	Kearifan Lingkungan
600	.4	.21		Peningkatan Peran Masyarakat
600	.4	.21	.1	Masyarakat Perkotaan
600	.4	.21	.2	Masyarakat Pedesaan
600	.4	.22		Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
600	.4	.22	.1	Organisasi Sosial Masyarakat
600	.4	.22	.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
600	.4	.23		Data dan Informasi Lingkungan
600	.4	.23	.1	Pengelolaan Data
600	.4	.23	.2	Pengelolaan Informasi
600	.4	.23	.3	Pengembangan Perangkat Lunak
600	.4	.23	.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
600	.4	.24		Kelembagaan Lingkungan
600	.4	.24	.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
600	.4	.24	.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
600	.4	.25		Standarisasi dan teknologi
600	.4	.25	.1	Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan
600	.4	.25	.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
600	.4	.25	.3	Teknologi Ramah Lingkungan
600	.4	.26		Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
600	.4	.26	.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
600	.4	.26	.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian
700				PENGAWASAN
700	.1			Pengawasan Internal
700	.1	.1		Rencana Pengawasan
700	.1	.1	.1	Rencana Strategis Pengawasan
700	.1	.1	.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
700	.1	.1	.3	Rencana Kinerja Tahunan
700	.1	.1	.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
700	.1	.1	.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
700	.1	.2		Pelaksanaan Pengawasan
700	.1	.2	.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO) Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut
700	.1	.2	.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
700	.1	.2	.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
700	.1	.2	.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
700	.1	.2	.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
700	.1	.2	.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
700	.1	.2	.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
700	.1	.2	.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
700	.1	.2	.9	Good Corporate Governance (GCG)

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
800				KEPEGAWAIAN
800	.1			Sumber Daya Manusia
800	.1	.1		Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800	.1	.1	.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan
800	.1	.1	.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
800	.1	.1	.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800	.1	.1	.4	Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
800	.1	.2		Formasi dan Pengadaan Pegawai
800	.1	.2	.1	Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
800	.1	.2	.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
800	.1	.2	.3	Pengumuman Kelulusan ASN
800	.1	.2	.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
800	.1	.2	.5	Pengangkatan ASN
800	.1	.2	.6	Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)
800	.1	.2	.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
800	.1	.2	.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800	.1	.3		Mutasi Pegawai
800	.1	.3	.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
800	.1	.3	.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
800	.1	.3	.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/ Fungsional
800	.1	.3	.4	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
800	.1	.3	.5	Peninjauan Masa Kerja
800	.1	.3	.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800	.1	.4		Pengembangan Karir
800	.1	.4	.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
800	.1	.4	.2	Penyesuaian ijazah
800	.1	.4	.3	Penyusunan Sistem Karier
800	.1	.4	.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
800	.1	.4	.5	Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
800	.1	.5		Kinerja Aparatur Sipil Negara
800	.1	.5	.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
800	.1	.5	.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
800	.1	.5	.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800	.1	.6		Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
800	.1	.6	.1	Kode Etik Pegawai
800	.1	.6	.2	Disiplin
800	.1	.6	.3	Pemberhentian Dengan Hormat
800	.1	.6	.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
800	.1	.6	.5	Pemberhentian Sementara
800	.1	.6	.6	Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
800	.1	.7		Bantuan Hukum
800	.1	.8		Status dan Kedudukan Pegawai
800	.1	.8	.1	Status Kepegawaian
800	.1	.8	.2	Kedudukan Kepegawaian
800	.1	.8	.3	Keberatan Pegawai
800	.1	.8	.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800	.1	.9		Sistem Informasi Kepegawaian
800	.1	.9	.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
800	.1	.9	.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
800	.1	.9	.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
800	.1	.9	.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800	.1	.10		Pengawasan dan pengendalian
800	.1	.10	.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
800	.1	.10	.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
800	.1	.10	.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
800	.1	.10	.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
800	.1	.10	.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
800	.1	.10	.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800	.1	.11		Administrasi Pegawai
800	.1	.11	.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
800	.1	.11	.2	Cuti Sakit
800	.1	.11	.3	Cuti Bersalin
800	.1	.11	.4	Cuti Tahunan
800	.1	.11	.5	Cuti Alasan Penting
800	.1	.11	.6	Cuti Besar
800	.1	.11	.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
800	.1	.11	.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
800	.1	.11	.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan
800	.1	.11	.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
800	.1	.11	.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
800	.1	.11	.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
800	.1	.11	.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800	.1	.12		Kesejahteraan Pegawai
800	.1	.12	.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
800	.1	.12	.2	Asuransi Pegawai/BPJS
800	.1	.12	.3	Tabungan Perumahan
800	.1	.12	.4	Bantuan Sosial
800	.1	.12	.5	Pakaian Dinas
800	.1	.12	.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
800	.1	.12	.7	Pemberian Tali Kasih
800	.1	.12	.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
800	.1	.12	.9	Olahraga dan Rekreasi
800	.1	.12	.10	Rekam Medis
800	.1	.13		Administrasi Perseorangan
800	.1	.13	.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
800	.1	.13	.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
800	.1	.13	.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
800	.1	.13	.4	Sekretaris Daerah
800	.1	.13	.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
800	.1	.14		Penilaian Kompetensi
800	.1	.14	.1	Penilaian Kompetensi
800	.1	.14	.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800	.2			Pendidikan dan Pelatihan
800	.2	.1		Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
800	.2	.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
800	.2	.2	.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
800	.2	.2	.2	Pedoman-pedoman kediklatan
800	.2	.2	.3	Kurikulum-kurikulum diklat
800	.2	.2	.4	Modul-modul diklat
800	.2	.2	.5	Panduan fasilitator
800	.2	.2	.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
800	.2	.2	.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
800	.2	.2	.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
800	.2	.2	.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
800	.2	.3		Widyaiswara
800	.2	.3	.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
800	.2	.3	.2	Sertifikasi Widyaiswara

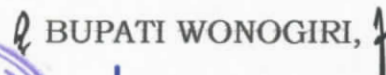
KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
800	.2	.3	.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
800	.2	.3	.4	Penilaian Widyaiswara
800	.2	.3	.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
800	.2	.3	.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
800	.2	.4		Penyelenggaraan Diklat
800	.2	.4	.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
800	.2	.4	.2	Pelaksanaan Diklat
800	.2	.4	.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
800	.2	.4	.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
800	.2	.4	.5	Sistem informasi diklat
800	.2	.4	.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
800	.2	.4	.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
800	.2	.5		Alumni
800	.2	.6		Bimbingan Teknis, Workshop, dan Simposium
900				KEUANGAN
900	.1			Keuangan Daerah
900	.1	.1		Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
900	.1	.1	.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
900	.1	.1	.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
900	.1	.1	.3	Penyampaian RAPBD kepada Dewan Perwakilan
900	.1	.1	.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
900	.1	.2		Penyusunan Anggaran
900	.1	.2	.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) yang telah disetujui Sekretaris Daerah
900	.1	.2	.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
900	.1	.3		Pelaksanaan Anggaran
900	.1	.3	.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
900	.1	.3	.2	Pendapatan
900	.1	.3	.3	Belanja
900	.1	.3	.4	Pembiayaan Daerah
900	.1	.3	.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
900	.1	.3	.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
900	.1	.3	.7	Daftar Gaji
900	.1	.3	.8	Kartu Gaji
900	.1	.3	.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
900	.1	.3	.10	Laporan Keuangan



KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
900	.1	.4		Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900	.1	.4	.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
900	.1	.5		Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
900	.1	.6		Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900	.1	.6	.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
900	.1	.6	.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
900	.1	.6	.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
900	.1	.6	.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulanan/ Semesteran
900	.1	.7		Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
900	.1	.7	.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan
900	.1	.7	.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan Lampirannya SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Nota Kredit Bank Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
900	.1	.7	.3	Buku Rekening Bank
900	.1	.7	.4	Keputusan Pembukuan Rekening
900	.1	.7	.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
900	.1	.8		Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
900	.1	.8	.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
900	.1	.8	.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan
900	.1	.9		Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
900	.1	.10		Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja
900	.1	.10	.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
900	.1	.10	.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
900	.1	.10	.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
900	.1	.10	.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
900	.1	.11		Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
900	.1	.11	.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
900	.1	.11	.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
900	.1	.11	.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
900	.1	.11	.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900	.1	.12		Anggaran Daerah
900	.1	.12	.1	Anggaran Daerah
900	.1	.12	.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
900	.1	.13		Pendapatan dan Investasi Daerah
900	.1	.13	.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
900	.1	.13	.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain : fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring
900	.1	.13	.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
900	.1	.13	.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
900	.1	.13	.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
900	.1	.14		Fasilitasi Dana Perimbangan
900	.1	.14	.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
900	.1	.14	.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring evaluasi dana alokasi khusus
900	.1	.14	.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
900	.1	.14	.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain : Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya
900	.1	.14	.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain : Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
900	.1	.15		Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
900	.1	.15	.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi Rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

KLASIFIKASI				URUSAN/FUNGSI
900	.1	.15	.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900	.1	.15	.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900	.1	.15	.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900	.1	.15	.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

BUPATI WONOGIRI, 

 
JOKO SUTOPO